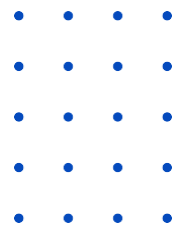


LAPORAN

ANALISIS CSF

META INDIKATOR

KINERJA FISKAL DAERAH



2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) META INDIKATOR KINERJA FISKAL DAERAH

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak terlepas modifikasi dari penerapan *fiscal federalism* di beberapa negara bagian di Benua Eropa yang berlandaskan pada teori tradisional (*first-generation theories*) dan *new perspective theories* (*second-generation theories*). Peran dan fungsi pengelolaan keuangan yang diserahkan kepada pemerintahan pada lini bawah yang digunakan untuk ruang pelayanan publik. Dalam beberapa penelitian di beberapa negara bagian di Eropa, bahwa pengambilan kebijakan terdesentralisasi menurut tingkatan terbawah dalam sistem pemerintahan dan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terbawah untuk memastikan bahwa rakyat atau masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif ruang pelayanan publik (Olaide et al., 2022)

Hubungan sektor pengelolaan keuangan yang dikembalikan kepada publik, pemerintahan daerah seharusnya mempunyai pengetahuan lebih baik tentang karakteristik wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat dengan rentang kendali yang jauh (Bushashe & Bayiley, 2024). Dengan demikian, harapannya adalah pemerintahan daerah bisa mengambil keputusan terbaik atas permasalahan di daerah terkait penyediaan produk barang serta jasa dengan lebih efektif dan efisien, yang lebih dikenal sebagai pengetahuan efisiensi alokasi dalam pendanaan serta membelanjakan dengan program yang tepat sasaran (Hidayat & Yulianita, 2025).

Pengembangan teori generasi tahap kedua, disempurnakan dengan berfokus pada pentingnya pembagian menurut tingkatan kewenangan sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat dalam mengatur serta mengelola pendapatan dan belanja (*revenue and expenditure assignment*) diantara tingkatan level pemerintahan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa peran dan posisi pemerintahan daerah dapat dipengaruhi dengan menerapkan desentralisasi fiskal daerah (Olaide et al., 2025). Peran pemerintah pusat telah terbagi dalam mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan di tingkat daerah, maka pemerintahan daerah mengambil peran tersebut untuk mengelola kewenangan yang lebih besar namun tetap berlandaskan pada prinsip keseimbangan antar wilayah dalam mengembangkan perekonomian sumber daya daerah. Sebagai upaya yang terus diselaraskan dengan konsolidasi fiskal, kepentingan untuk menciptakan pemerintah daerah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan perekonomian di daerah, teori generasi tahap kedua ini juga mempunyai pondasi pada dua struktur yaitu adanya interaksi yang tak terbatas antar tingkat pemerintahan serta interaksi horizontal untuk menjaga kesenjangan antar wilayah pemerintahan daerah.

Pendekatan kebijakan pengelolaan desentralisasi fiskal dari penerimaan daerah yang sah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan daerah provinsi seiring dengan kebijakan pada daerah otonom, yang memberikan keleluasaan untuk pemerintahan daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah (Hung & Thanh, 2022).

Di era kemandirian fiskal daerah saat ini, terbitnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, lebih mengupayakan agar Pemerintahan Daerah lebih mandiri untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Namun dalam penerapan di Indonesia, konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tetap di kawal oleh Pemerintah Pusat untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah (Ren et al., 2025). Strategi implementasi yang diharapkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal melalui penguatan sistem perpajakan yang dikelola Pemerintahan Daerah (*local tax ratio*), mengurangi ketimpangan dan keseimbangan fiskal vertikal dan horizontal, perbaikan kualitas belanja daerah untuk ruang kebijakan publik serta sinergi, kolaborasi dan harmonisasi belanja antara pusat dan daerah (Hern, 2024).

Kebijakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berumber dari Pendapatan Asli Daerah terutama yang fundamental melalui penerimaan sektor perpajakan daerah. Sumber potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak rokok serta opsen mineral bukan logam dan batuan. Selain itu juga, terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan sistem dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota melalui opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan kebijakan opsen ini diharapkan nilai manfaat uang (*value for money*) dapat dimanfaatkan secara langsung (*realtime*) ke kabupaten/kota untuk kesimbangan pembangunan daerah antar wilayah kabupaten/kota.

Dengan perubahan paradigma desentralisasi fiskal ini diharapkan Pemerintahan Daerah lebih kuat dan mandiri dalam pengelolaan fiskal daerah. Pengelolaan fiskal daerah yang kuat tercermin dalam kontribusi pajak daerah terhadap nilai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (Sima et al., 2023). Pengelolaan pajak daerah ini memainkan 2 (dua) peran yang saling menguatkan, antara potensi penerimaan daerah dari sektor perpajakan maupun dari sisi insentif fiskal daerah untuk memberi dukungan pada perkembangan investasi di daerah. Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi rasio pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari perekonomian daerah provinsi, nilai rasio pajak daerah provinsi yang diukur dengan *local tax ratio* yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah provinsi, nilai rasio penerimaan pajak daerah provinsi merupakan angka rasio antara pajak daerah provinsi yang diterima sesuai amanat kewenangan dengan PDRB, angka rasio penerimaan pajak daerah provinsi dipengaruhi oleh

pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga (Sugiyarto et al., 2025).

2. TINJAUAN LITERATUR

Studi literatur dalam kajian ini sebagai bahan referensi yang menjelaskan mengenai kapasitas fiskal telah banyak dilakukan penelitian yang dilakukan di beberapa negara dengan kondisi dan karakteristik dari daerah yang menjadi objek penelitian. Menurut pandangan (Hang & Pham, 2025) yang mengidentifikasi bahwa terdapat ruang persaingan diantara pemerintahan daerah dalam alokasi jumlah belanja untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan dapat memberikan alternatif beberapa pilihan kepada rakyat bahwa untuk memilih berbagai produk barang serta jasa *service* publik yang sesuai dengan kebutuhan serta *budget* anggaran mereka. Dengan situasi seperti tersebut, tidak akan pernah terjadi jika penyediaan produk barang untuk kepentingan publik dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan daerah dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan publik sesuai *preferensi* dan kebutuhan masyarakat melalui sumber pendanaan sendiri (Danquah et al., 2024).

Penelitian yang menganalisa peran pemerintah pusat yang bersifat sentralistik telah terbagi dalam mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan di tingkat daerah, maka pemerintahan daerah mengambil peran tersebut untuk mengelola kewenangan yang lebih besar namun tetap berlandaskan pada prinsip keseimbangan antar wilayah dalam mengembangkan perekonomian sumber daya daerah (Agyei-ababio & Ansong, 2023). Sebagai upaya yang terus diselaraskan dengan konsolidasi fiskal, kepentingan untuk menciptakan pemerintah daerah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan perekonomian di daerah, teori generasi tahap kedua ini juga mempunyai pondasi pada dua struktur yaitu adanya interaksi yang tak terbatas antar tingkat pemerintahan serta interaksi horizontal untuk menjaga kesenjangan antar wilayah pemerintahan daerah (Yin et al., 2024).

Penelitian yang lebih komprehensif melalui pendekatan dengan menyelaraskan serta menggabungkan untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran (*expenditure needs*). Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, keleluasaan pada sektor pendapatan dan pengeluaran belanja diserahkan kepada pemerintahan daerah secara bersamaan. Apabila terdapat kesenjangan diantara potensi pendapatan dan dengan besarnya mandatori tanggung jawab pengeluaran belanja yang didelegasikan oleh otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, maka pemerintah pusat akan menutupnya dengan sistem bagi hasil melalui transfer ke daerah, dan dapat juga dengan mekanisme hibah atau pinjaman daerah (Zongo & Faso, 2022).

Penelitian yang membahas mengenai kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah dengan tujuan menciptakan keseimbangan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam model keseimbangan umum Keynesian dalam kebijakan makroekonomi merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja daerah (*government*

expenditure) (Boogaard et al., 2018). Ketika konsumsi belanja daerah dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi *multiplier effect* dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi yang berdampak pada naiknya kebutuhan akan barang, jasa serta kapital modal, maka hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi (Mpofu, 2022).

3. DATA DAN METHOD

Pendekatan terhadap non-stasioneritas variabel ini dapat menghasilkan regresi palsu. Variabel yang stasioner pada level level dan level first differential dapat digunakan dalam simulasi model Autoregressive Distributed Lag dan Vector Error Correction Model. Banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan model ARDL, diantaranya (Usman et al, 2002) menggunakan uji terikat ARDL untuk mencari hubungan antara indeks kapasitas fiskal, pendapatan termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah.

a. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Sumber
Indeks Kapasitas Fiskal	IKFD	Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	DJPK Kementerian Keuangan, BPKAD Prov. Sumsel
Pendapatan Termobilisasi	IKSS1	Pendapatan termobilisasi merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD	Bapenda Prov. Sumsel
Kemandirian Fiskal	IKSS2	Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat	DJPK Kementerian Keuangan, Bapenda, BPKAD Prov. Sumel
Pertumbuhan Pendapatan	IKSS3	Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan	DJPK Kementerian Keuangan, Bapenda, BPKAD Prov. Sumel
Kekuatan Pajak Daerah	IKSS4	Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan	Badan Pusat Statistik, Bapenda Prov. Sumsel

			kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)	
Kontribusi terhadap Pendapatan	PAD	IKSS5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	DJPk Kementerian Keuangan, Bapenda, BPKAD Prov. Sumel
Realisasi PAD		IKSS6	Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.	Bapenda dan BPKAD Prov. Sumsel
Kontribusi terhadap PDRB Non Migas	PAD	IKSS7	Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.	Badan Pusat Statistik, Bapenda Prov. Sumsel, BPKAD Prov. Sumsel
Kontribusi terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	PAD PDRB	IKSS8	Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/pendapatan konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.	Badan Pusat Statistik, Bapenda Prov. Sumsel, BPKAD Prov. Sumsel

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

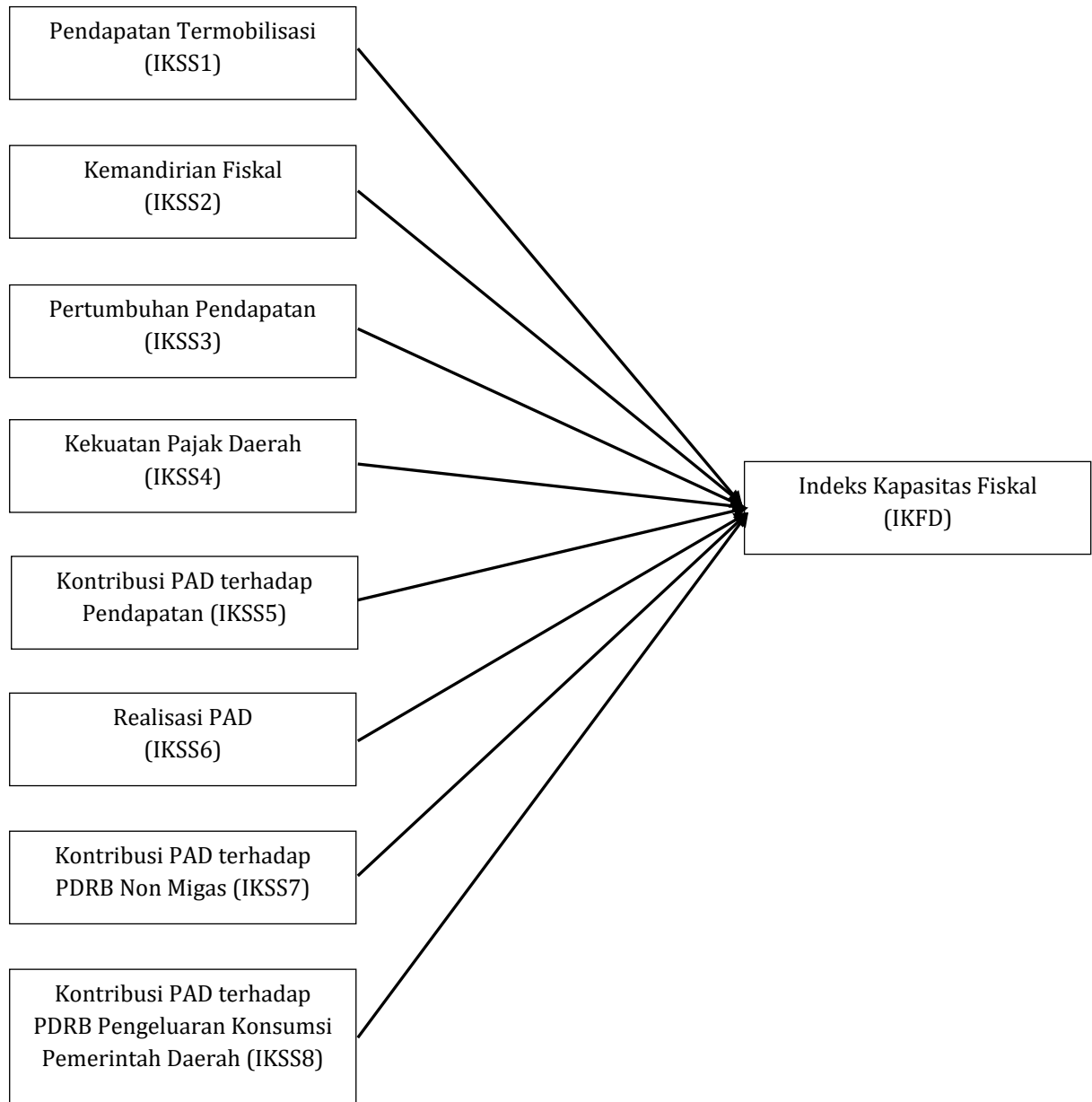
Sumber: Hasil Pengolahan (2026)

b. Jenis dan Variasi Data

Dalam kajian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh organisasi atau peneliti lain dan tersedia untuk umum. Data yang digunakan mencakup data tahunan (*time series*). Dalam penelitian ini menggunakan data tahunan periode 2010 hingga 2025. Sumber utama data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapenda Prov. Sumsel, BPKAD Prov. Sumsel, serta sumber-sumber lain seperti jurnal, artikel, dan laporan.

Untuk menghindari variasi data yang terlalu lebar maka dalam kajian ini digunakan persamaan data logaritma natural ($\ln$)

c. Struktur Pengujian Data



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Uji akar unit digunakan untuk mengidentifikasi tren stokastik dalam data. Untuk mempelajari hubungan antar variabel, persamaan umum berikut diusulkan:

$$IKFD_t = \beta_0 + \beta_1 IKSS1_t + \beta_2 IKSS2_t + \beta_3 IKSS3_t + \beta_4 IKSS4_t + \beta_5 IKSS5_t + \beta_6 IKSS6_t + \beta_7 IKSS7_t + \beta_8 IKSS8_t + e_t \quad (1)$$

Di mana: β_0 adalah konstanta dan β_{1-8} adalah koefisien variabel eksogen, dan ε adalah faktor kesalahan. Dari persamaan (1) di atas, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Pesaran et al., (2001). Jika deret tersebut stasioner pada tingkat pertama dan tingkat perbedaan atau keduanya, model ini dapat digunakan. Jika terdapat hubungan jangka panjang antara variabel yang dipertimbangkan, model ARDL jangka panjang dan jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$\Delta IKFD_t = \alpha_0 + \alpha_1 IKSS1_{t-1} + \alpha_2 IKSS2_t + \alpha_3 IKSS3_t + \alpha_4 IKSS4_t + \alpha_5 IKSS5_t + \alpha_6 IKSS6_t + \alpha_7 IKSS7_t + \alpha_8 IKSS8_t + \sum_{i=1}^n \beta_1 \Delta IKFD_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_2 \Delta IKSS2_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_3 \Delta IKSS3_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_4 \Delta IKSS4_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_5 \Delta IKSS5_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_6 \Delta IKSS6_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_7 \Delta IKSS7_{t-1} + \sum_{i=1}^n \beta_8 \Delta IKSS8_{t-1} + ECM_{t-1} + e_t \quad (2)$$

di mana β adalah volatilitas dalam jangka pendek dan suku koreksi kesalahan menunjukkan seberapa cepat keadaan kembali ke titik stabil setelah periode sebelumnya mengalami guncangan. Suku koreksi kesalahan biasanya berada di antara -1 dan 0.

Model kedua untuk mengungkap arah kausalitas antara indeks kapasitas fiskal, pendapatan termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah, diselidiki dengan menerapkan pendekatan kausalitas Granger VECM setelah mengkonfirmasi kointegrasi antar variabel. Menurut Granger (1969), model koreksi kesalahan vektor (VECM) lebih tepat untuk memeriksa kausalitas antar seri jika variabel terintegrasi dalam I (1). VECM adalah bentuk terbatas dari vektor autoregresif tak tentu dan pembatasan diberlakukan jika terdapat hubungan jangka panjang antar seri. Sistem model koreksi kesalahan (ECM) menggunakan semua seri secara endogen. Sistem ini memungkinkan variabel yang diprediksi untuk menjelaskan dirinya sendiri baik melalui lag-nya sendiri maupun indol dari variabel gaya, serta dalam istilah koreksi kesalahan dan dalam hal residual. Persamaan VECM disajikan sebagai berikut:

$$(1 - \beta) \begin{bmatrix} IKSS1 \\ IKSS2 \\ IKSS3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^p (1 - \beta) \begin{bmatrix} \delta_{11i} & \delta_{12i} & \delta_{13i} \\ \gamma_{21i} & \gamma_{22i} & \gamma_{23i} \\ \varphi_{31i} & \varphi_{32i} & \varphi_{33i} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} IKSS1_{t-i} \\ IKSS2_{t-j} \\ IKSS3_{t-k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega \\ \vartheta \\ \mu \end{bmatrix} ECT_{t-1} + \begin{bmatrix} \rho_{1t} \\ \rho_{2t} \\ \rho_{3t} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Perbedaan pertama antara indeks kapasitas fiskal, pendapatan termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah digunakan dalam persamaan (2), dimana t-i adalah kriteria informasi Akaike (AIC) yang menyediakan seleksi lag. Untuk dampak jangka panjang α dan β digunakan. Untuk mengevaluasi hubungan jangka panjang, teknik analisis yang digunakan adalah model ARDL jangka panjang dan jangka pendek.

Pada persamaan model ARDL yang ditunjukkan pada persamaan (2) merupakan periode yang menggambarkan respon jangka panjang dan jangka pendek; e adalah kesalahannya; α_1 hingga α_8 merupakan koefisien variabel dalam jangka panjang; β_1 sampai β_8 merupakan koefisien variabel dalam jangka pendek, ε_t merupakan sisa yang diperoleh dari estimasi kointegrasi yang persamaan perbedaannya ditunjukkan pada persamaan (4):

$$\Delta IKFD_t = \varphi_0 + \sum_{i=1}^n \gamma_1 \Delta IKFD_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_2 \Delta IKSS1_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_3 \Delta IKSS2_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_4 \Delta IKSS3_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_5 \Delta IKSS4_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_6 \Delta IKSS5_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_7 \Delta IKSS6_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_8 \Delta IKSS7_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_9 \Delta IKSS8_{t-1} + ECM_{t-1} + \delta e_{t-1} \quad (4)$$

Dimana: φ_0 mewakili koefisien parameter, dengan γ_1 hingga γ_9 mewakili efek jangka pendek. Koefisien suku koreksi kesalahan digambarkan dengan notasi δ yang akan menunjukkan ukuran seberapa cepat guncangan dikoreksi pada periode berikutnya hingga mencapai titik stabil. Nilai koefisien pengaruh ini signifikan secara teoritis dan $e_{(t-1)}$ negatif merupakan ukuran ketidakstabilan pada persamaan 4.

Model ARDL mengatasi kekurangan model ARDL konvensional dalam mengevaluasi saling ketergantungan variabel. Untuk menjaga agar semua variabel lain dalam persamaan tetap konstan, model ARDL digunakan untuk memperkirakan, menganalisis, dan memberikan visualisasi perubahan variabel regresi serta implikasinya terhadap regresi itu sendiri untuk penyesuaian jangka pendek hingga jangka panjang. Model ARDL mengharuskan variabel stasioner pada tingkat perbedaan pertama dan terintegrasi dengan variabel yang dievaluasi.

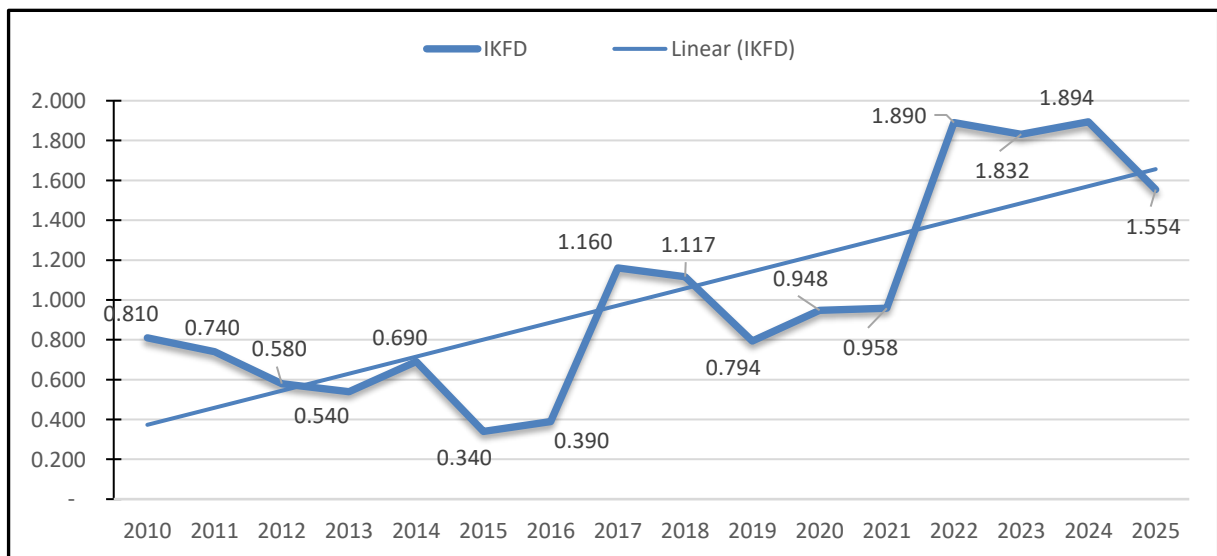
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukkan trend yang terus mengalami peningkatan selama periode pengamatan dari mulai tahun 2010 sampai 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kapasitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya (Sheikh & Nur, 2025).

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, belanja pegawai yang menjadi proxy terhadap indeks kapasitas fiskal daerah terus ditekan tidak melebihi batas penggunaannya sebesar 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bagi hasil ke daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan mengikuti kondisi perkembangan makro ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga Provinsi Sumatera Selatan dapat mengalokasikan belanja untuk peningkatan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat, hal ini mengindikasikan bahwa peran otonomi daerah yang diberikan kewenangan kepada daerah otonom Pemerintah Provinsi telah berjalan baik, karena Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah lebih dekat untuk melihat kondisi pelayanan publik masyarakat di daerah. Pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat, antara lain pelayanan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemiskinan (Tolossa & Melese, 2024).

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah tergambar pada Gambar 2 berikut.



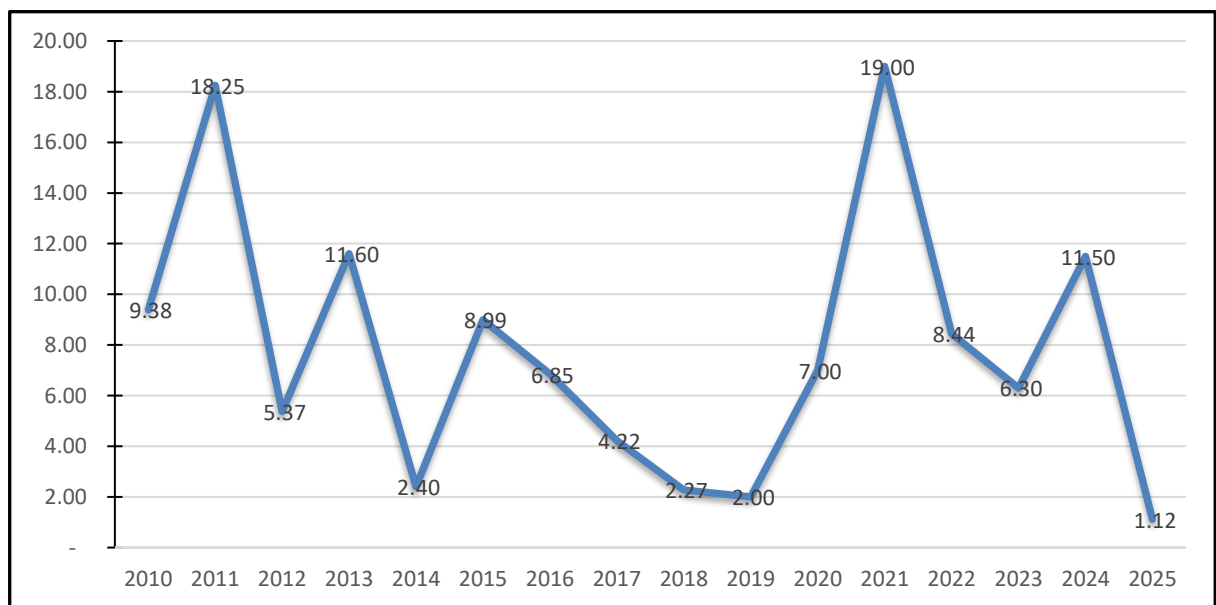
Gambar 2. Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Analisa Perkembangan Pendapatan Termobilisasi (*Revenue Mobilization*)

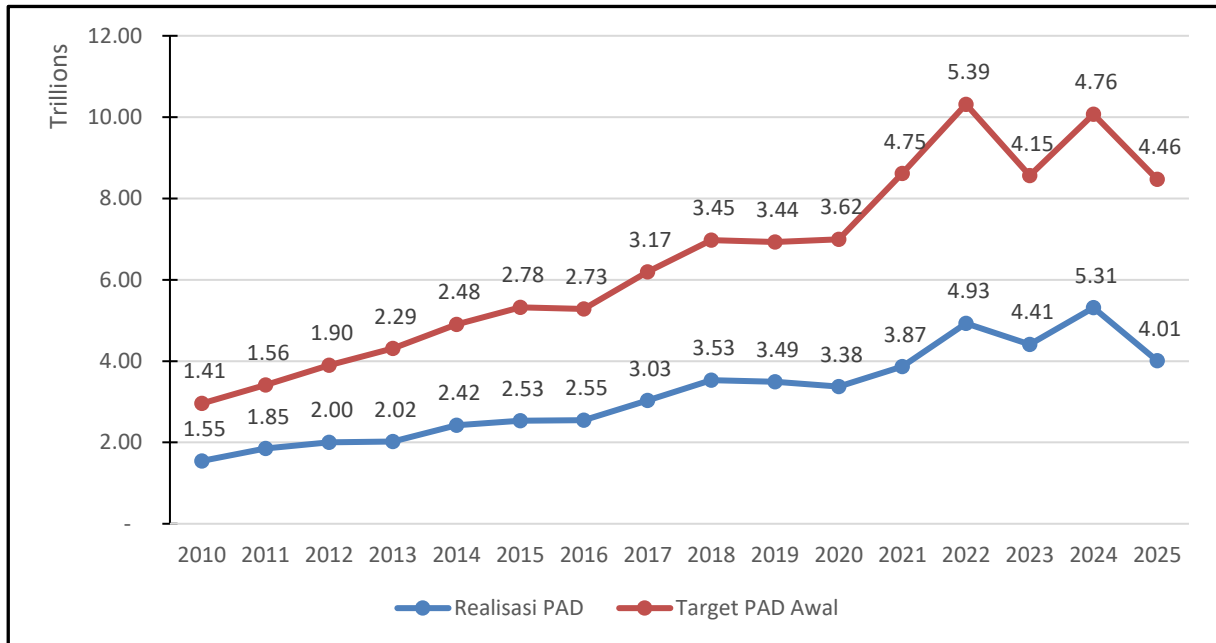
Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Dengan indikatornya untuk mendekatkan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) pada garis normal yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik (Johnson & Omodero, 2021).

Perkembangan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) dari sisi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kinerja yang semakin baik dari pengamatan dari mulai tahun 2010 sampai 2025. Dengan pendekatan basis data pajak daerah yang semakin baik, dapat meningkatkan kredibilitas penerimaan pendapatan sektor pajak daerah itu sendiri.

Kondisi pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) tergambar pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Perkembangan Pendapatan Termobilisasi (*Revenue Mobilization*)



Gambar 4. Perkembangan Realisasi PAD terhadap Target PAD Awal

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap rencana dari target awal pada Gambar 4 menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai 2025, hal ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dari rencana awal target Pendapatan Asli Daerah.

Analisa Perkembangan Kemandirian Fiskal

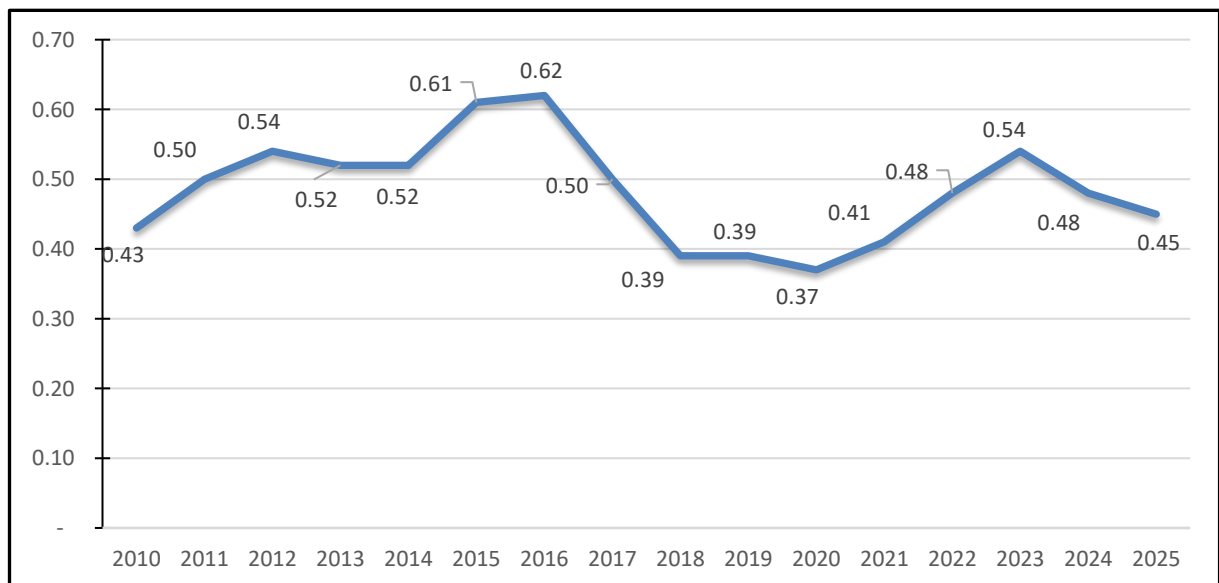
Kemandirian fiskal daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan tanpa harus tergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat ke Daerah. Kemandirian fiskal dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan melihat kondisi karakteristik, potensial daerah serta perkembangan makro ekonomi. Sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi telah diatur hak kewenangan pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan (Ackom, 2025).

Kewenangan yang diberikan yaitu pada penerimaan pendapatan sektor pajak daerah, sektor retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah. Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan (Chen & Hsu, 2024). Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi

instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik (Shi et al., 2024).

Perkembangan kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 16 tahun terakhir (2010 – 2025) menunjukkan perkembangan yang sangat fluktuatif, dimana kondisi tertinggi indeks kemandirian fiskal terjadi pada tahun 2016 dengan indeks sebesar 0,62, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 banyak sektor jasa yang memberikan andil pada perekonomian Sumatera Selatan. Kemandirian fiskal terendah terjadi pada tahun 2020 dengan besaran indeks 0,37, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi dalam perekonomian nasional karena adanya Covid-19, sehingga fokus pembiayaan pada kesehatan, pengamanan jejaring sosial kemasyarakatan serta pemulihan perekonomian.

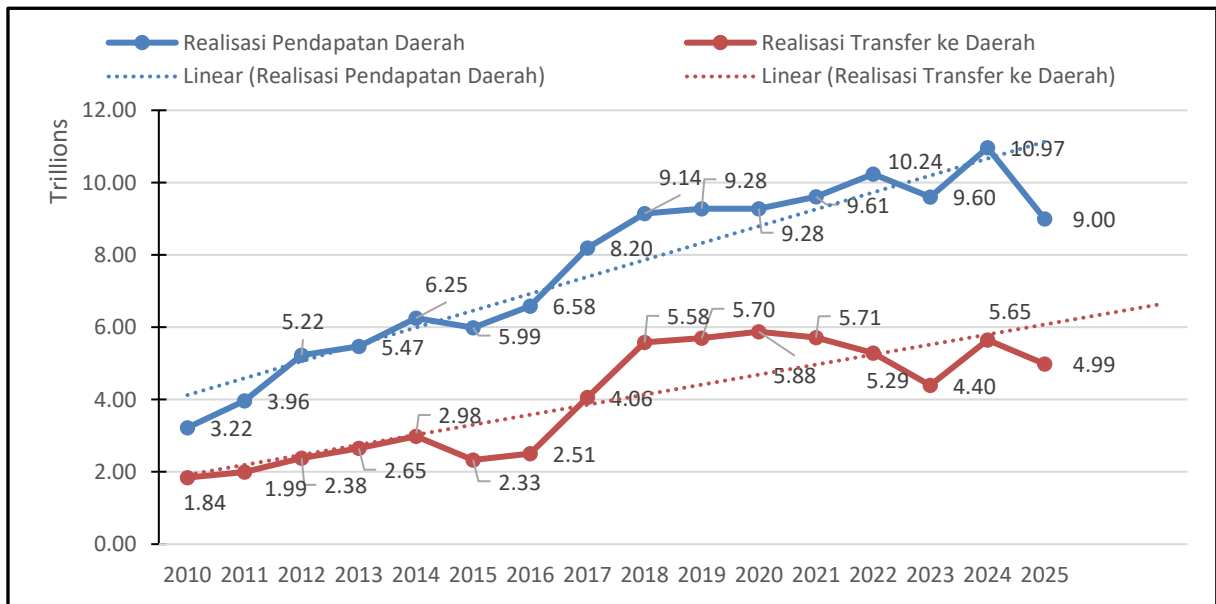
Perkembangan kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada Gambar 5, dengan kondisi ini Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada level menuju mandiri dengan rata-rata indeks kemandirian fiskal sebesar 0,48 dan membutuhkan proporsional dari dana transfer Pemerintah Pusat sebesar 0,52 atau 52 persen.



Gambar 5. Perkembangan Kemandirian Fiskal

Perkembangan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan, hal ini sebanding dengan peningkatan Total Pendapatan Daerah. Adapun rasio penerimaan pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan rata-rata sebesar 0,52 atau 52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsional penerimaan dana bagi hasil sektor perkebunan, kehutanan serta sumber daya alam berupa mineral dan batubara mengalami peningkatan produktivitas, sementara dana bagi hasil dari sektor pajak Pemerintah Pusat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan Sumber Daya Manusia yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan penerimaan dana transfer ke daerah selama periode tahun 2010 – 2025 ditunjukkan pada Gambar 6 berikut.

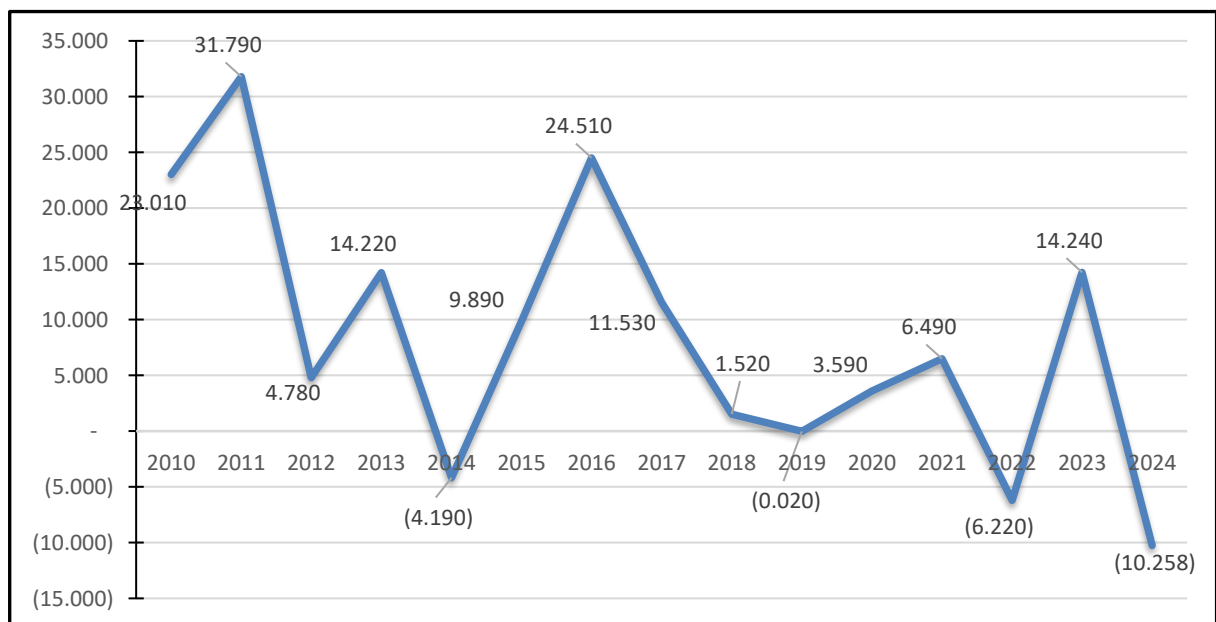


Gambar 6. Perkembangan Penerimaan Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Analisa Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan

Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuatif yang signifikan selama periode 2010 – 2025, hal ini pengaruh kondisi perekonomian global dan nasional sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Pelemahan struktur ekonomi daerah disebabkan karena daya beli masyarakat yang cenderung turun sehingga produktivitas dan konsumsi barang dan jasa mengalami fluktuatif.

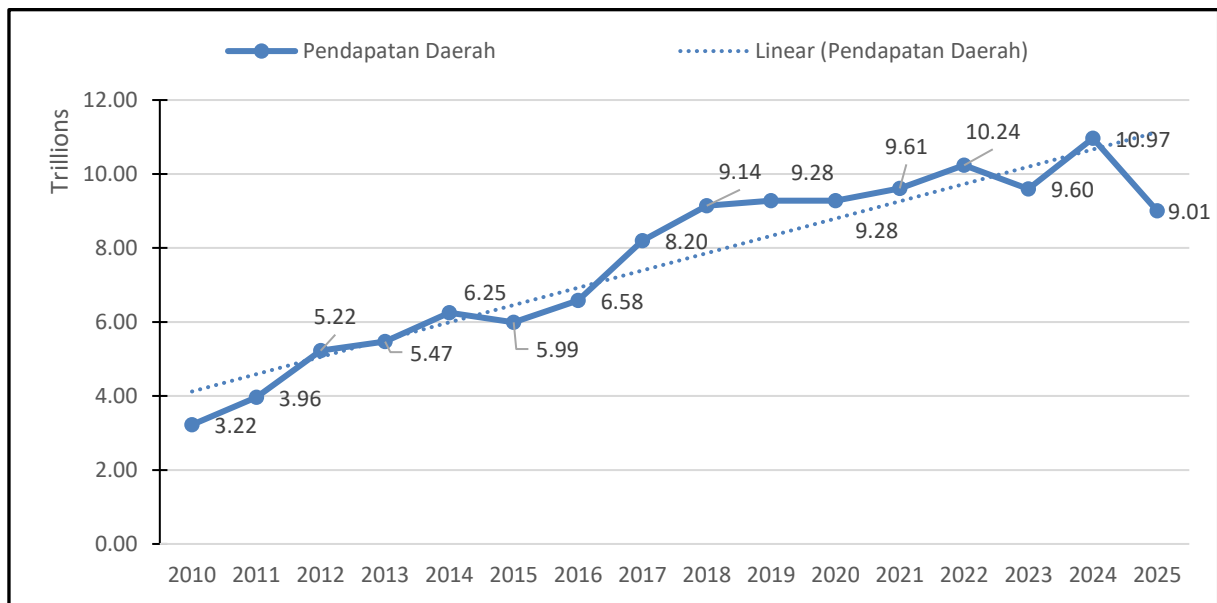
Perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah ditunjukan pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)

Kondisi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2010 – 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Terutama pada sektor basis data pajak daerah yang mengalami peningkatan. Produktivitas sumber daya alam yang mengalami peningkatan serta perkembangan investasi yang menjadi faktor pendorong perekonomian Sumatera Selatan.

Perkembangan pendapatan daerah ditunjukkan pada Gambar 8 berikut.



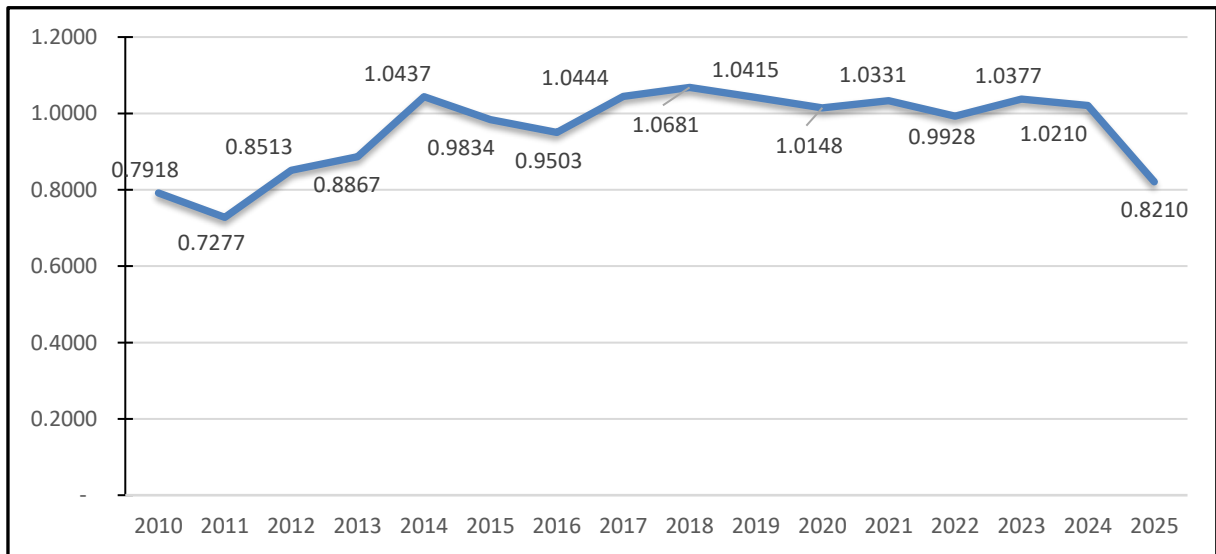
Gambar 8. Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Rp.)

Analisa Perkembangan Kekuatan Pajak Daerah

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga (Sugiyarto et al., 2025).

Dari struktur pajak yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, fungsi pajak yang dapat mempengaruhi harga produk dengan memberikan stimulus fiskal sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian suatu daerah wilayah tertentu sesuai dengan karakteristik dari daerah.

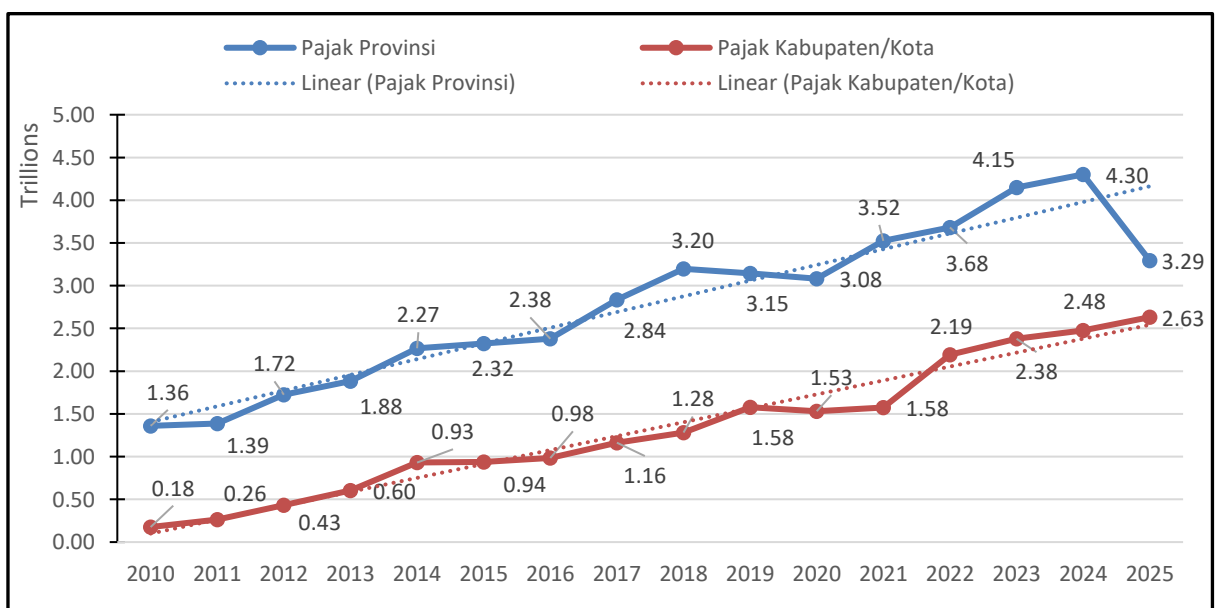
Perkembangan kekuatan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan pajak Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Perkembangan Kekuatan Pajak Daerah

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik (Minhaj & Ahmed, 2023).

Perkembangan penerimaan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 10 berikut.



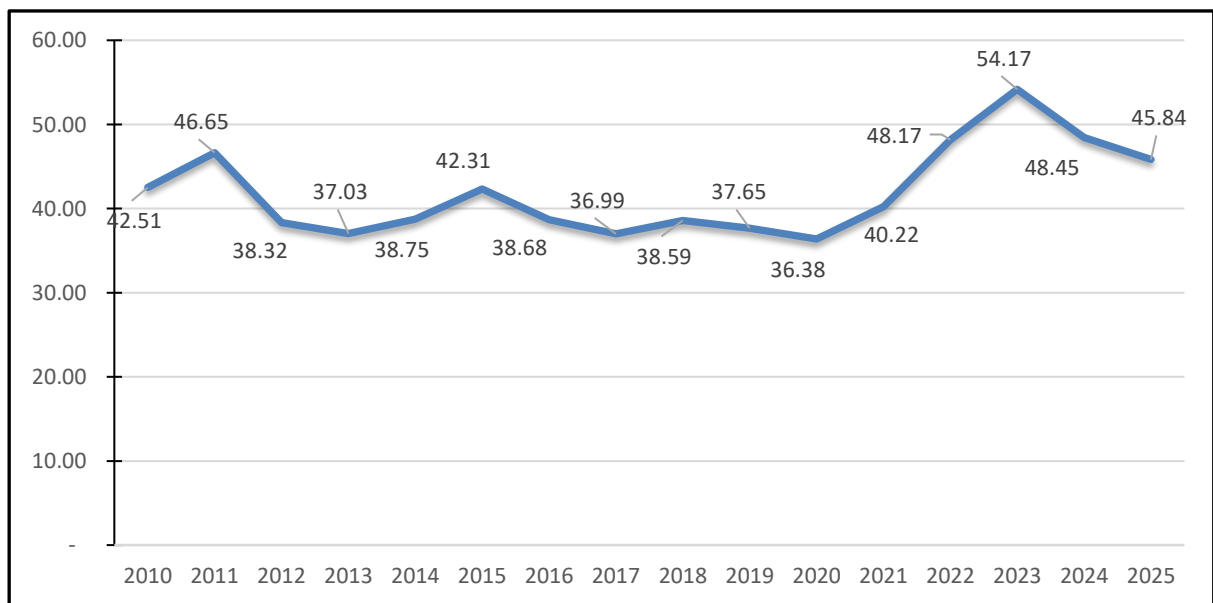
Gambar 10. Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

Analisa Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal (Lakhan et al., 2023).

Strategi dan peran untuk meningkatkan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2010 – 2025, peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata masih dibawah 50 persen, hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan akan dana transfer dari Pemerintah Pusat masih sangat dominan dalam pembiayaan pembangunan di daerah.

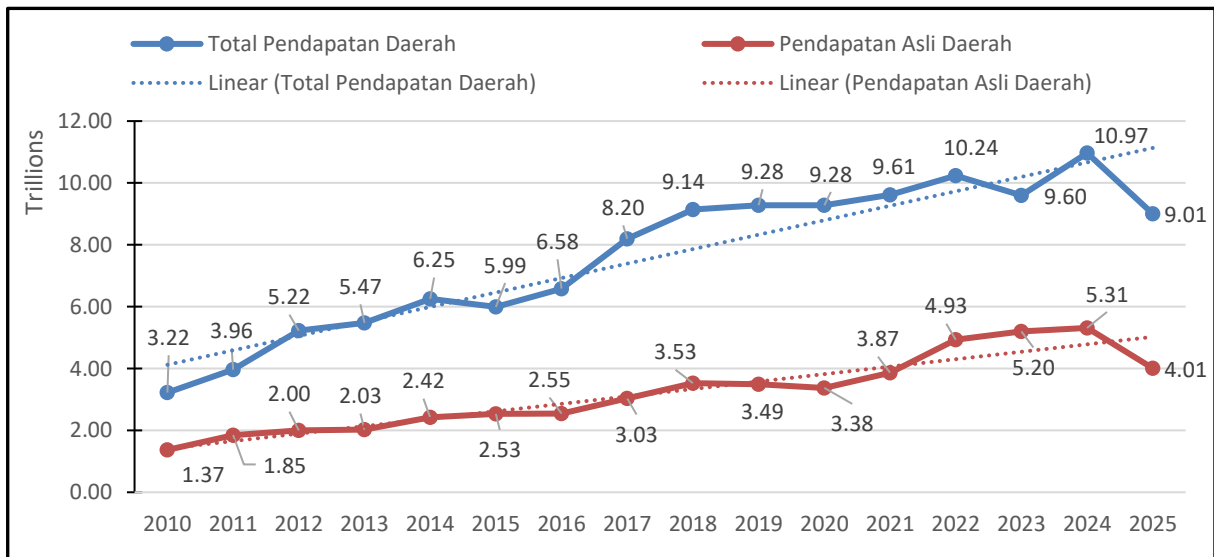
Perkembangan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditunjukkan pada Gambar 11 berikut.



Gambar 11. Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan

Secara statistik, perkembangan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2010 – 2025, hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah telah baik namun perlu dioptimalkan kembali.

Perkembangan perkembangan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada Gambar 12 berikut.

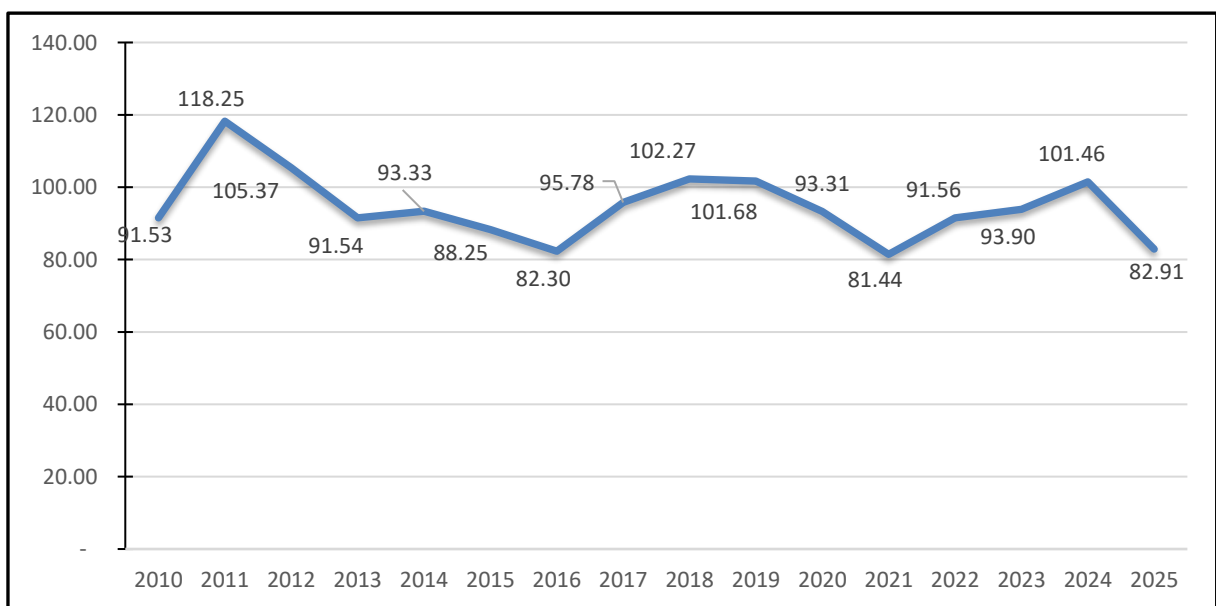


Gambar 12. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah

Analisa Perkembangan Realisasi PAD

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari target yang telah ditetapkan selama periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat fluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar 118,25 persen sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 81,44 persen. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain dengan pembentukan satuan tugas optimalisasi pendapatan asli daerah bersama dengan stakeholder lainnya.

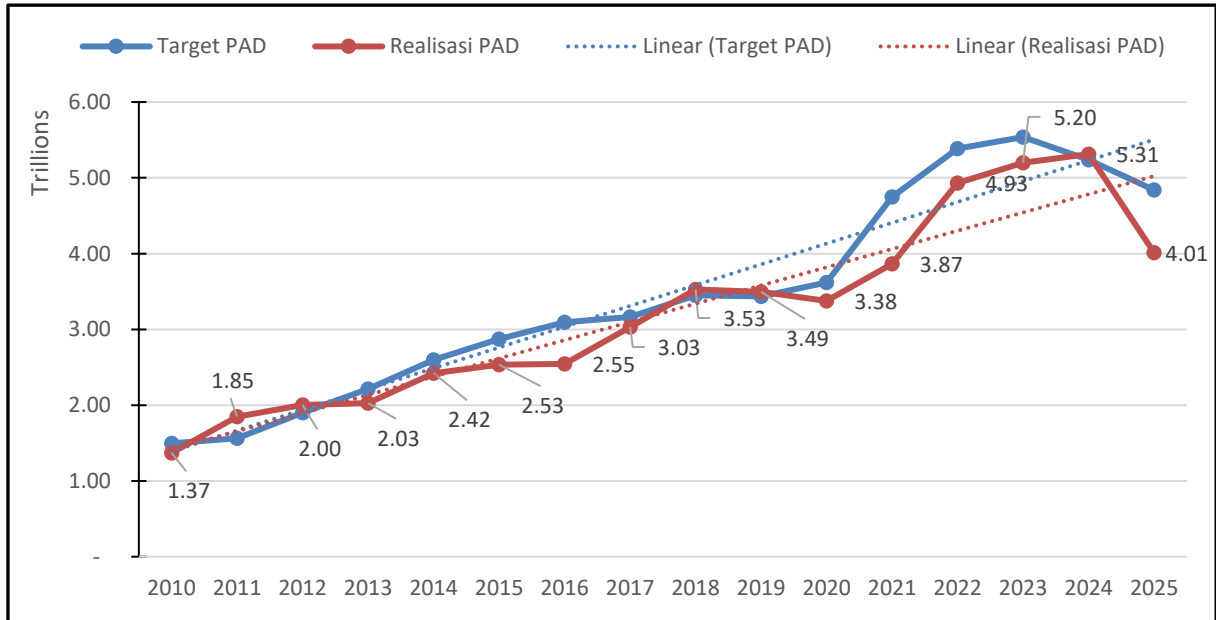
Perkembangan realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pada Gambar 13 berikut.



Gambar 13. Perkembangan Realisasi PAD

Perkembangan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang telah ditetapkan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2010 – 2025.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pada Gambar 14 berikut.

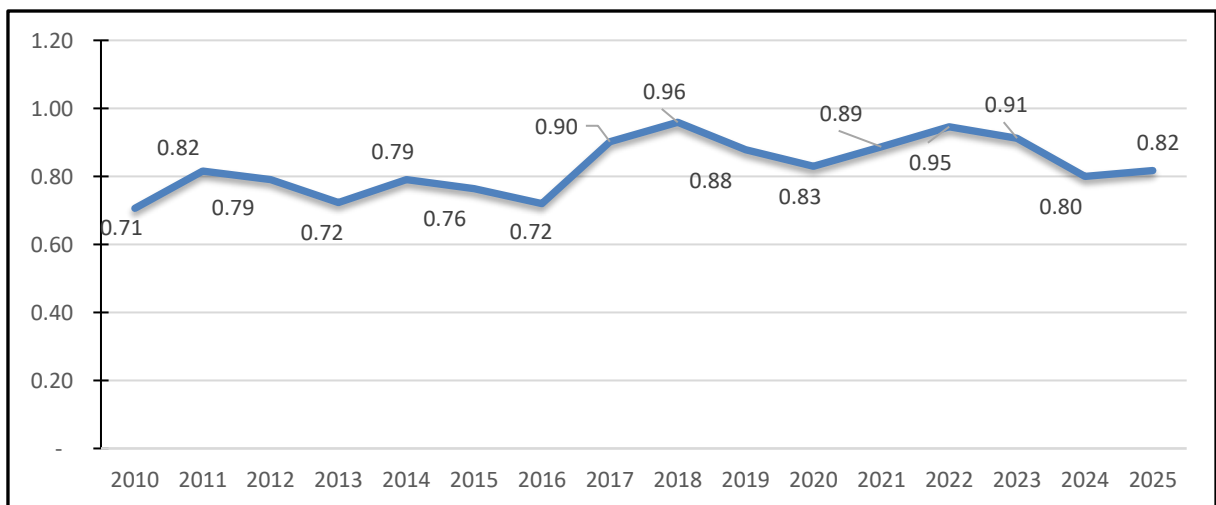


Gambar 14. Perkembangan Realisasi PAD

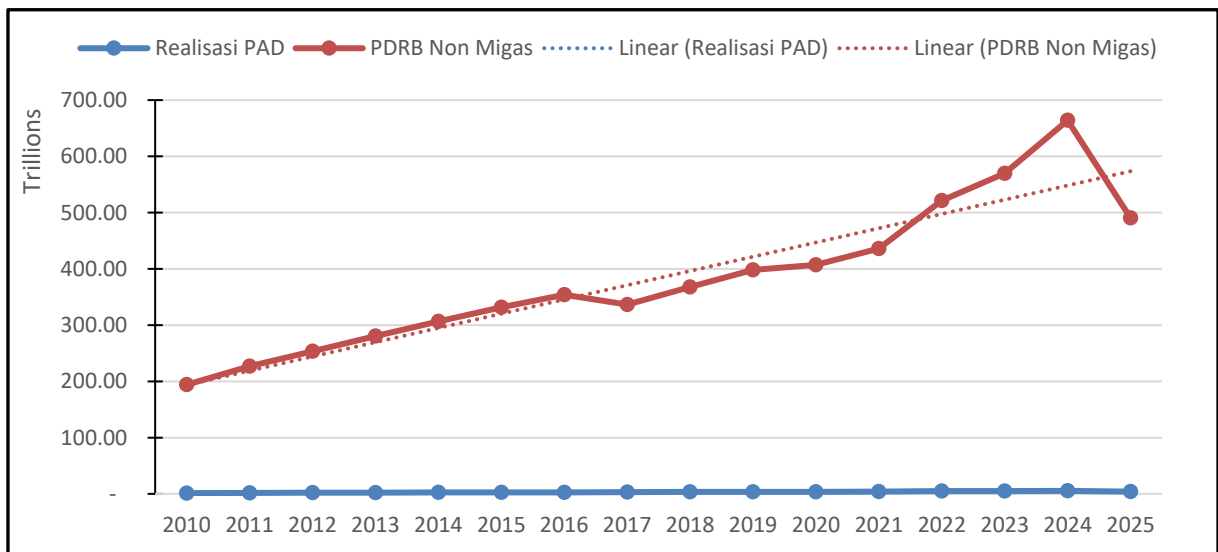
Analisa Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas

Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap perekonomian daerah Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas, hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap sektor riil lapangan usaha.

Perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas ditunjukkan pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15. Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas

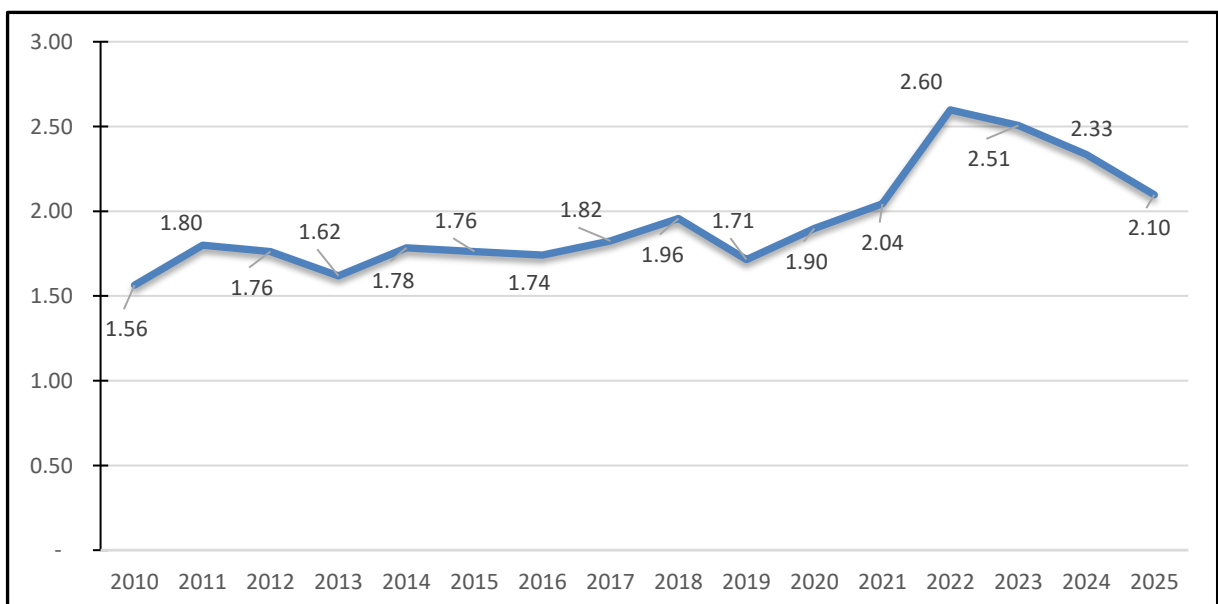


Gambar 16. Realisasi PAD Terhadap PDRB Non Migas

Analisa Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

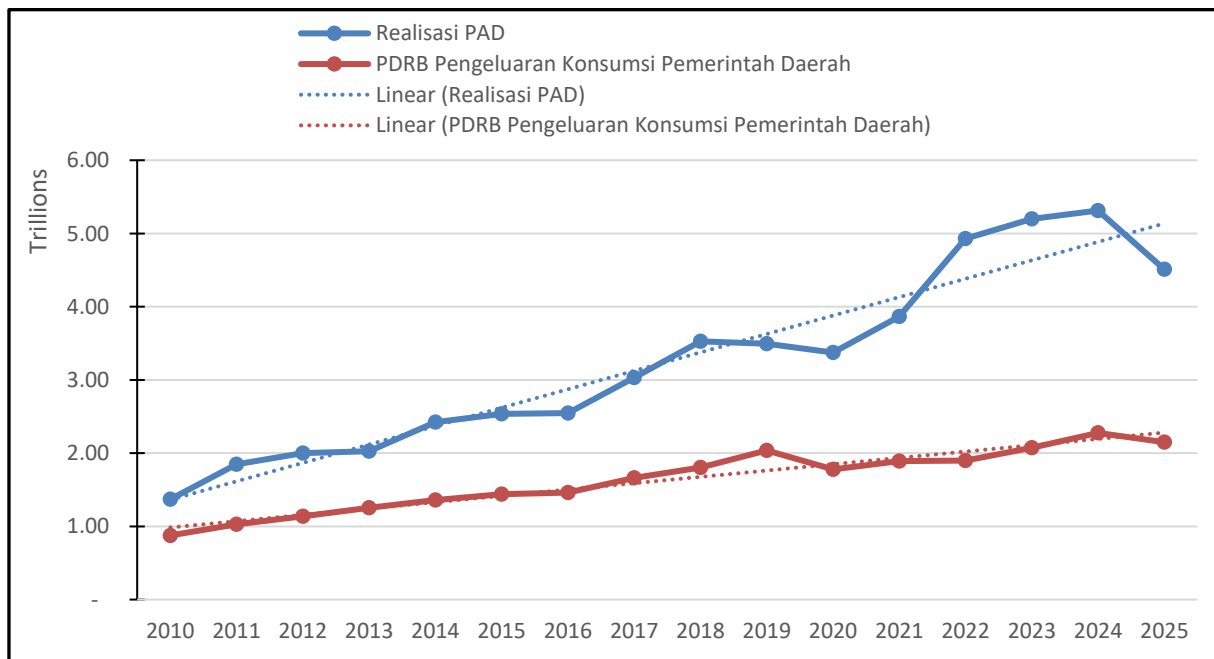
Peran dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembentuk perekonomian daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi proxy pengeluaran belanja pemerintah daerah yang menghasilkan produk barang dan jasa di masyarakat. Selama periode tahun 2010 – 2025, perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif.

Perkembangan kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah ditunjukkan pada Gambar 17 berikut.



Gambar 17. Perkembangan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Perkembangan realisasi PAD dan PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah selama periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan peningkatan.



Gambar 18. Realisasi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Analisis Statistik Deskriptsi

Hasil running data menjelaskan statistik deskriptif berdasarkan tabel 2 dibawah ini dimana datanya berbentuk logaritma natural. Hal ini menggambarkan pentingnya indeks kapasitas fiskal, pendapatan termobilisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan pendapatan, kekuatan pajak daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, realisasi PAD, kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas serta kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah. Nilai rata-rata tertinggi adalah pendapatan termobilisasi sebesar 19.000 dan indeks kapasitas fiskal sebesar 1.8940, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan termobilisasi dan indeks kapasitas fiskal memiliki tingkat tren yang relatif stabil. Standar deviasi seluruh variabel adalah positif, dengan nilai tertinggi pada pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10.8228 dan terendah kemandirian fiskal sebesar 0.0737.

Tabel 2: Hasil Uji Statistik Deskripsi

Deskripsi	Mean	Median	Max	Min	Std. Dev	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera
IKFD	1.0148	0.8790	1.8940	0.3400	0.5208	0.6049	2.1094	1.5046
IKSS1	5.7980	4.8800	19.000	1.1187	4.4114	1.7892	6.1106	14.9882
IKSS2	0.4837	0.4800	0.6200	0.3700	0.0737	0.2193	2.3572	0.4036
IKSS3	9.8568	8.1900	31.790	8.1400	10.8228	0.3333	2.4548	0.4943
IKSS4	0.9623	1.0038	1.0681	0.7277	0.1014	1.0495	2.9598	2.9384
IKSS5	41.9187	39.4850	54.170	36.380	5.2570	0.8953	2.7515	2.1787
IKSS6	92.3705	92.3790	102.27	81.440	6.0131	0.0053	2.6085	0.1022
IKSS7	0.8188	0.81000	0.9600	0.6820	0.0890	0.0497	1.8125	0.9465
IKSS8	1.9366	1.8100	2.6000	1.5600	0.3069	1.0067	2.9142	2.7077
Observations	16	16	16	16	16	16	16	16

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Hubungan antar variabel data panel disajikan pada Tabel 3. Untuk mengetahui sejauh mana dan arah hubungan antar variabel digunakan uji korelasi Pearson. Jika nilainya 1 maka terdapat hubungan sempurna antar variabel. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan dua variabel. Jika kenaikan suatu variabel menaikkan variabel yang lain, maka hal ini ditandai dengan tanda positif, sedangkan jika negatif maka berlaku sebaliknya. Dari hasil running data pada Tabel 3 terlihat bahwa hubungan semua variabel mempunyai hubungan yang positif. Korelasi tidak hanya memudahkan analisis hubungan linier antar variabel, namun juga dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan tersebut.

Tabel 3: Hasil Uji Multikolineritas

Multicollinearity									
	IKFD	IKSS1	IKSS2	IKSS3	IKSS4	IKSS5	IKSS6	IKSS7	IKSS8
IKFD	1.000	0.226	0.704	0.433	0.895	0.130	0.255	0.442	0.327
IKSS1	0.226	1.000	0.207	0.338	0.057	0.042	0.131	0.458	0.178
IKSS2	0.704	0.207	1.000	0.124	0.753	0.106	0.111	0.046	0.108
IKSS3	0.433	0.338	0.124	1.000	0.517	0.107	0.265	0.358	0.571
IKSS4	0.895	0.057	0.753	0.517	1.000	0.220	0.380	0.197	0.394
IKSS5	0.130	0.042	0.106	0.107	0.220	1.000	0.050	0.018	0.358
IKSS6	0.255	0.131	0.111	0.265	0.380	0.050	1.000	0.298	0.295
IKSS7	0.442	0.458	0.046	0.358	0.197	0.018	0.298	1.000	0.401
IKSS8	0.327	0.178	0.108	0.571	0.394	0.358	0.295	0.401	1.000

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Uji Akar Unit

Sebelum melakukan estimasi dengan model ARDL, beberapa syarat ekonometri harus dipenuhi seperti pengujian stasioneritas data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test) dengan menggunakan 2 (dua) metode ADF-Fisher Chi-square dan ADF-Choi Z-stat, pengujian ini dikembangkan oleh (Levin et al., 2002). Hasil pengujian menunjukkan bahwa data tidak stasioner, homogenitas (hipotesis nol) dan heterogenitas (hipotesis alternatif).

Tabel 4: Hasil Uji Akar Unit

Variabel	ADF-Fisher Chi-square		Phillips-Peron		Keterangan
	t-Statistik	Prob	t-Statistik	Prob	
$\Delta (IKFD)$	-3.783018	0.0149	-4.117317	0.0082	stasioner
$\Delta (IKSS1)$	-4.242474	0.0065	-5.619306	0.0006	stasioner
$\Delta (IKSS2)$	-3.657671	0.0215	-6.176528	0.0003	stasioner
$\Delta (IKSS3)$	-3.601198	0.0256	-7.990795	0.0000	stasioner
$\Delta (IKSS4)$	-3.497045	0.0281	-3.855379	0.0131	stasioner
$\Delta (IKSS5)$	-3.773980	0.0163	-3.174377	0.0438	stasioner
$\Delta (IKSS6)$	-3.720035	0.0179	-3.972591	0.0106	stasioner
$\Delta (IKSS7)$	-3.582557	0.0227	-5.721267	0.0007	stasioner
$\Delta (IKSS8)$	-3.202403	0.0455	-3.406307	0.0292	stasioner

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Lag Order Selection Criteria

Kriteria dan penentuan lag optimum pada model penelitian ini dilakukan untuk melihat panjang lag optimum pada setiap variabel dinamis pada persamaan model. Penentuan lag optimum dilakukan oleh (Papers, 1994) dalam menentukan panjang lag optimum dengan menggunakan salah satu metode kriteria informasi dari Akaike information Equation Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion (SC), hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Lag Order Selection Criteria

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-291.6728	NA	0.013642	9.887259	10.01619	9.951527
1	73.43218	637.2689	1.02e-07	-1.443539	-0.406367	-1.031433
2	320.8854	413.5281	1.01e-10	-8.856481	-6.934435	-8.106735
3	562.2250	318.4528	4.87e-14	-14.15087	-11.44641	-14.21758
4	637.1738	107.0262	5.18e-15	-19.88113	-14.12802	-15.11450
5	745.0092	102.2963	6.07e-16	-20.00064	-16.14556	-18.33635
6	878.5642	62.60938*	2.34e-16	-21.17423	-15.84184*	-20.19393
7	863.1354	30.42378	2.32e-16*	-22.79451	-16.50848	-20.36487
8	901.7865	21.13473	2.18e-16	-23.24731*	-16.06943	-20.46513*

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Tabel 5 menunjukkan kriteria pemilihan lag order dengan melihat nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil (-23.24731) pada lag optimum 8.

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Trace Statistics lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistics lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang terjadi kointegrasi model persamaan. Hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel 6.

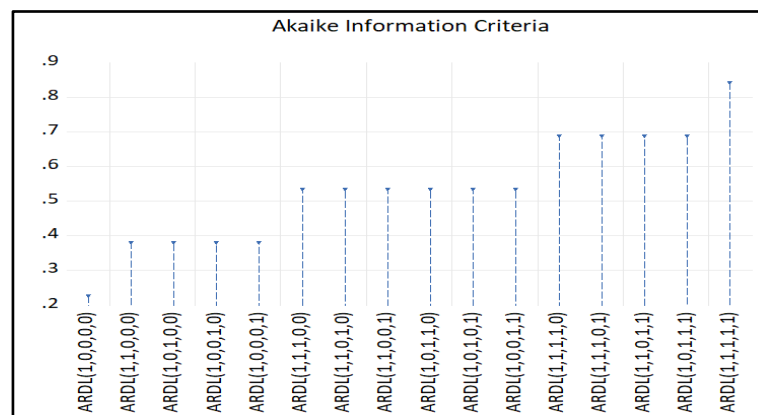
Tabel 6. Johansen Co-integration Test

Trace Test				
Null Hypothesized (H_0)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.641679	93.91460	67.74589	0.0001**
At most 1*	0.413681	44.91987	44.87223	0.0215**
At most 2	0.206412	14.51695	23.71897	0.5145
At most 3	0.136259	6.984214	14.63271	0.5027
At most 4	0.072326	1.476963	3.862565	0.2658
Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H_0)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.641679	47.97473	33.77287	0.0003**
At most 1*	0.413681	30.45193	26.12434	0.0101**
At most 2	0.206412	10.56583	21.69962	0.6413
At most 3	0.136259	5.508551	13.21770	0.6537
At most 4	0.072326	1.476963	3.812665	0.2658

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Hasil Uji Model ARDL

Untuk menentukan panjang lag optimal pada variabel penelitian ini digunakan Akaike Information Criterion (AIC) yang ditunjukkan pada Gambar 6. Panjang lag maksimum yang dipilih adalah 1 (ARDL(1, 1, 1, 1, 1)) untuk berbagai variasi model. Tabel 7 juga menunjukkan hasil uji terikat ARDL, dimana nilai estimasi F-statistik melebihi nilai batas kritis $I(0)$ dan $I(1)$, melampaui 5,840 pada tingkat signifikansi 1 persen pada data cross-section. Artinya hipotesis nol ditolak yang menunjukkan adanya kointegrasi dalam model.



Gambar 6. Akaike Information Criteria

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Tabel 7. Hasil Uji Model ARDL Bound

Hasil Uji Model ARDL Bound					Lag Max	
$IKFD_t = f(IKSS1_t, IKSS2_t, IKSS3_t, IKSS4_t, IKSS5_t, IKSS6_t, IKSS7_t, IKSS8_t)$					1,1,1,1,1	
Kriteria	10%		5%		1%	
	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
Nilai Bound Kritis	2.175	3.420	3.014	4.405	4.190	5.360

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Tabel 7 menyajikan hasil uji model ARDL Bound. Secara statistik, penampang melintang menunjukkan nilai F-statistik di atas nilai batas kritis pada taraf 10 persen, 5 persen, dan 1 persen, baik pada taraf maupun pada selisih pertama. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kinerja variabel terikat yaitu kapasitas fiskal daerah.

Estimasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Model ARDL

Pengujian estimasi model ARDL baik periode jangka pendek maupun jangka panjang, beserta analisis detailnya disajikan pada Tabel 8. Variabel terikatnya adalah kapasitas fiskal daerah (IKFD), dan hasilnya menunjukkan koefisien Error Correction Term (ECT) bernilai negatif (-0,021405) dengan tingkat kepercayaan signifikan sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan model dalam jangka panjang yang telah diperbaiki melalui penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang sehingga mencapai tingkat stabilitas sebesar 2,14 persen pada kondisi saat ini. Hasil pengujian model ARDL dan VEC dalam jangka pendek menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu kapasitas fiskal daerah (IKFD) mempunyai pengaruh yang signifikan pada lag 1. Variabel IKSS1 menunjukkan koefisien yang positif dan signifikan, sedangkan IKSS2 mempunyai pengaruh hubungan yang positif dan signifikan pada lag 1. Variabel IKSS3 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada lag 0, sedangkan IKSS4 mempunyai pengaruh hubungan yang positif dan signifikan pada lag 1. Variabel IKSS5 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada lag 0, sedangkan IKSS6 mempunyai pengaruh hubungan yang positif dan signifikan pada lag 1. Variabel IKSS7 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan pada lag 1, sedangkan IKSS8 mempunyai pengaruh hubungan yang positif dan signifikan pada lag 1.

Tabel 8. Hasil Uji Model ARDL Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Variabel Dependen: IKFD	Koefisien	Std-Error	t-Statistik	Prob
Estimasi Jangka Panjang				
IKSS1	0.067259	0.036942	1.820664	0.0251
IKSS2	0.660387	0.252141	2.619117	0.0146
IKSS3	0.036341	0.014836	2.449514	0.0419
IKSS4	0.677336	0.213459	3.173143	0.0001
IKSS5	0.083265	0.036698	2.268924	0.0032
IKSS6	0.047562	0.036527	1.302105	0.0363
IKSS7	0.751426	0.362102	2.075177	0.0003
IKSS8	0.096254	0.024045	4.003077	0.0205
Estimasi Jangka Pendek				
$\Delta IKSS1$	0.002880	0.001302	2.211981	0.0413
$\Delta IKSS2$	0.417343	0.142563	2.927428	0.0060
$\Delta IKSS3$	0.019062	0.003602	5.292059	0.0126
$\Delta IKSS4$	0.132262	0.036021	3.671802	0.0000
$\Delta IKSS5$	0.226318	0.120563	1.877176	0.0303
$\Delta IKSS6$	0.063314	0.026451	2.393633	0.0042
$\Delta IKSS7$	0.071820	0.051642	1.390728	0.0236
$\Delta IKSS8$	0.532164	0.250147	2.127405	0.0031
ECT_{t-1}	-0.021405	0.003601	-5.944182	0.0025

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Tabel 8 menyajikan hasil yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hubungan kinerja pendapatan termobilisasi memberikan dampak positif signifikan, dimana kenaikan kinerja pendapatan termobilisasi sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal sebesar indeks 0.0672. Kenaikan kinerja kemandirian fiskal daerah sebesar 1 indeks akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.6603. Kenaikan kinerja pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.0363. Kenaikan kinerja kekuatan pajak daerah sebesar rasio 1 akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.6773. Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.0832. Kenaikan realisasi PAD terhadap pencapaian target sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.0475. Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.7514. Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar rasio 1 akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.0962.

Tabel 8 juga menyajikan hasil yang menunjukan bahwa dalam jangka pendek hubungan kinerja pendapatan termobilisasi memberikan dampak positif signifikan, dimana kenaikan kinerja pendapatan termobilisasi sebesar 1 persen akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.00288. Kenaikan kinerja kemandirian fiskal daerah sebesar 1 indeks akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.4173. Kenaikan kinerja pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.0190. Kenaikan kinerja kekuatan pajak daerah sebesar rasio 1 akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.13226.

Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap pendapatan sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.2263. Kenaikan realisasi PAD terhadap pencapaian target sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.06331. Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas sebesar 1 persen akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.07182. Kenaikan kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar rasio 1 akan meningkatkan kinerja kapasitas fiskal daerah sebesar indeks 0.5321.

Uji Diagnostic

Hasil uji statistik diagnostik data yang digunakan antara lain uji autokorelasi dengan menggunakan uji Lagrange multiplier. Hasilnya menunjukkan hipotesis nol ditolak, menunjukkan tidak ada autokorelasi dari sisa lag yang ditentukan. Uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan cross product. Uji heteroskedastisitas terhadap hipotesis nol menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak ada kesalahan spesifikasi. Kemudian uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera menunjukkan hipotesis nol diterima yang berarti besar sampel yang diamati berdistribusi normal pada Gambar 7.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah model ARDL mempunyai varians residual yang konstan. Berdasarkan p-value terlihat sebagian besar variabel tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen, menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa model ARDL memenuhi asumsi homoskedastisitas, dimana varian errornya konstan dan tidak ada indikasi error bergantung pada variabel independen.

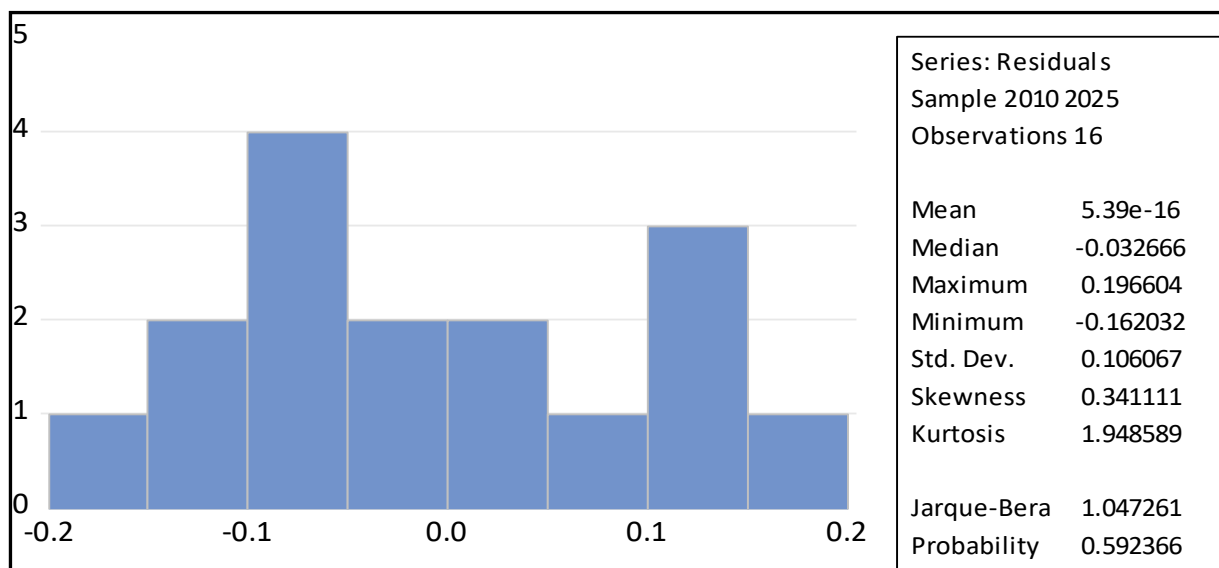
Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedasticity Model ARDL

Variabel Dependen: ABS(RESID)				
Variable	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.080324	0.054170	1.482813	0.2662
IKSS1	0.415268	0.825146	0.503266	0.5137
IKSS2	0.000721	0.000699	1.031473	0.2775
IKSS3	0.023041	0.013162	1.750569	0.3268
IKSS4	0.007387	0.005676	1.301444	0.2804
IKSS5	0.623251	0.422635	1.474679	0.3302
IKSS6	0.091542	0.041236	2.219953	0.4412
IKSS7	0.000236	0.000145	1.627586	0.7012
IKSS8	0.060321	0.032247	1.870592	0.6334
Uji statistik				
Serial Correlation (LM test)	Breusch-Godfrey		1.884294	0.1728
Ramsey Reset Test			0.270552	0.4309

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera menunjukkan statistik uji sebesar 1,047 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0,592. Dalam pengujian normalitas, hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah data mengikuti distribusi normal. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang umum digunakan (α 0,05), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, artinya data tidak mempunyai cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusinya tidak normal.

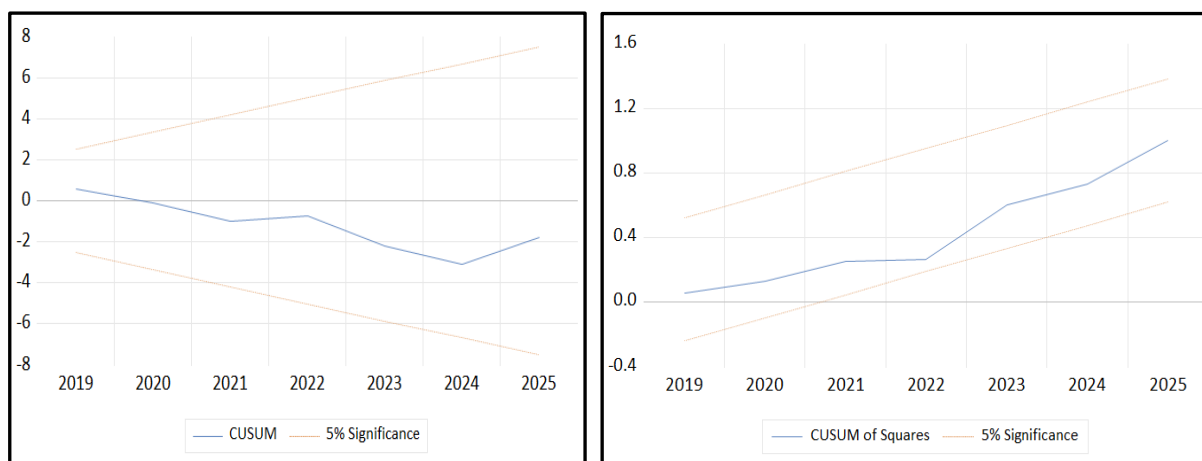


Gambar 7. Hasil Normalitas Histogram

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

Uji Stabilitas Model CUSUM and cusum of Squares Test

Kemudian, uji CUSUM dilakukan untuk menilai stabilitas hubungan jangka panjang dalam estimasi model ARDL. Uji ini secara terus menerus menghitung koefisien regresi dan residual dalam tingkat batas yang ditentukan. Biasanya, identifikasi tingkat batas melibatkan pembuatan grafik yang mewakili berbagai statistik rekursif sebagai fungsi dari variabel transisi berurutan. Ini adalah metode umum yang diterapkan dalam praktik untuk menentukan tingkat batas yang signifikan. Gambar 8 menunjukkan *Cumulative SUM of Recursive Residue* (CUSUM) dari hasil uji stabilitas ARDL. Semua garis yang diinginkan berada pada ambang kritis, dan tidak ada yang melewatinya di sepanjang kurva. Gambar 8 memberikan bukti stabilitas hasil estimasi model ARDL.



Gambar 8. Uji CUSUM and CUSUM of Squares

Sumber: Hasil pengolahan data output E-Views 13 (2026)

5. DISKUSI

Hasil estimasi model ARDL pada Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat koreksi penyesuaian antar periode waktu jangka pendek ke jangka panjang dalam hubungan negatif signifikan, hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian dari koreksi kesalahan dari vektor untuk dilakukan penyempurnaan untuk model jangka panjang.

Hubungan antara Pendapatan Termobilisasi dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pada periode jangka panjang maupun jangka pendek mengindikasikan adanya hubungan positif signifikan antara pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) dengan indeks kapasitas fiskal daerah. Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) yang semakin baik dengan tetap menjaga kredibilitas dari perencanaan awal Pendapatan Asli Daerah akan memastikan bahwa kapasitas ruang fiskal daerah yang digunakan untuk belanja pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik masyarakat semakin baik. Hasil kajian ini mengkonfirmasi adanya kesamaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shah et al., 2023) dan hasil penelitian yang dilakukan (Giorkhelidze, 2024).

Pendapatan termobilisasi yang semakin mendekati garis realisasi normal tentunya akan memperkecil bias ketidaktercapaian dari target yang telah ditetapkan dari perencanaan awal, hal ini akan meningkatkan kepercayaan di masyarakat bahwa kontribusi masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga kapasitas ruang fiskal daerah memberikan dampak positif antara lain pada pembangunan infrastruktur, belanja pelayanan kesehatan masyarakat, belanja untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat dan belanja untuk memperbaiki pengaman jejaring sosial masyarakat. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Saha, 2023), namun terdapat perbedaan hasil yang penelitian dari (Javeed Iqbal et al., 2024).

Hubungan antara Kemandirian Fiskal dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pada periode jangka panjang maupun jangka pendek menggambarkan adanya hubungan positif signifikan antara kemandirian fiskal suatu daerah dengan indeks kapasitas fiskal. Semakin mandiri suatu daerah dalam menggali potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan maka semakin tinggi indeks kapasitas fiskal daerah untuk pengeluaran pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan strategi untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh Pemerintahan Daerah agar lebih mandiri dan tidak mempunyai ketergantungan dengan dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat yang telah ditentukan penggunaannya. Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan mampu membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal sesuai dengan karakteristik dari daerah. Hasil analisa ini mengkonfirmasi adanya kesamaan hasil dari penelitian (Khan & Khan, 2023).

Kemandirian desentralisasi fiskal dengan indikator Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan daerah, dimana semakin besar perbandingan yang dihasilkan maka semakin mandiri suatu daerah. Jika daerah telah mandiri dari sisi penerimaan daerah maka dapat berdampak pada keleluasaan dalam pengaturan belanja tematik yang lebih fokus, seperti pembelanjaan untuk tematik pengentasan kemiskinan. Desentralisasi fiskal dan redistribusi ketimpangan pendapatan intra-daerah, dengan menitikberatkan pada perbedaan peran desentralisasi dari sisi pengeluaran dan redistribusi ketimpangan pendapatan bersifat negatif dari sisi pendapatan. Penelitian serupa menginspirasi kesamaan hasil analisa dari penelitian (Udumoh et al., 2023), namun terdapat perbedaan hasil dari penelitian oleh (Cota et al., 2023).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, memberikan fleksibilitas dalam kapasitas ruang desentralisasi fiskal daerah menuju kemandirian desentralisasi fiskal daerah dari ketergantungan TKDD. Kekurangan penerimaan pendapatan sering kali dikompensasi dengan dana transfer yang lebih besar dan diakumulasikan dalam utang yang berkelanjutan, dapat meningkatkan kerentanan di beberapa daerah dan membatasi ruang gerak desentralisasi fiskal untuk mengatasi berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hasil analisa ini berbeda penerapan dari penelitian (Adan et al., 2023).

Mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bentuk konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, agar pemerintahan daerah lebih mandiri dalam mengelola pendapatan daerah provinsi. Stimulus dana transfer pemerintah pusat hanya bersifat merangsang pertumbuhan yang timpang sebagai akibat adanya kesenjangan antarwilayah provinsi, antara lain kondisi karakteristik

daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat memiliki inklusivitas tersendiri, berdasarkan penanganan permasalahan di daerah, seperti pemberian dana insentif fiskal, dana alokasi khusus maupun umum, dana bagi hasil dengan memanfaatkan *treasury deposit facility*. Hasil analisa ini mengindikasikan adanya kemiripan dari hasil penelitian oleh (Liu et al., 2023).

Kemandirian fiskal daerah berarti kemampuan daerah untuk menggali sumber PAD dalam bentuk pajak dan retribusi daerah serta mengelola belanja daerah sesuai dengan tematik dan kondisi karakteristik daerah. Ketika konsumsi pengeluaran pemerintah daerah meningkat dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal pembangunan memerlukan sumber pembiayaan yang lebih besar melalui PAD. PAD yang diproxy dengan peningkatan belanja operasi melalui belanja gaji dan tunjangan pegawai akan meningkatkan konsumsi per kapita serta peningkatan belanja barang dan jasa akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa itu sendiri. Hasil analisa ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh (Dempere et al., 2023).

Hubungan antara Pertumbuhan Pendapatan dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL pada Tabel 8 menjelaskan bahwa baik dalam periode jangka panjang maupun jangka pendek, terdapat hubungan positif signifikan antara pertumbuhan pendapatan dengan indeks kapasitas fiskal daerah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan suatu daerah maka akan memberikan dukungan kinerja yang positif terhadap indeks kapasitas fiskal daerah. Pemerintahan Daerah akan lebih banyak keleluasaan dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk pengeluaran belanja untuk kepentingan masyarakat sehingga ruang untuk pelayanan publik akan semakin baik. Hasil kajian ini mengkonfirmasi adanya kesamaan hasil analisa dari penelitian sebelumnya oleh (Afonso & Blanco-Arana, 2024).

Pertumbuhan pendapatan daerah yang tinggi akan menciptakan konsumsi pengeluaran belanja Pemerintahan Daerah yang tinggi, sehingga konsumsi akan barang dan jasa di masyarakat akan meningkat dan hal ini akan mendorong ruang kapasitas fiskal daerah untuk pelayanan publik semakin baik karena kondisi masyarakat yang semakin sejahtera. Kemandirian desentralisasi fiskal dengan indikator Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) merupakan rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah, dimana semakin besar perbandingan yang dihasilkan maka semakin mandiri suatu daerah. Jika daerah telah mandiri dari sisi penerimaan daerah maka dapat berdampak pada keleluasaan dalam pengaturan belanja tematik yang lebih fokus, seperti pembelanjaan untuk tematik pengentasan kemiskinan. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh (De Wettinck & van Mourik, 2024). Desentralisasi fiskal dan redistribusi ketimpangan pendapatan intra-daerah, dengan menitikberatkan pada perbedaan peran desentralisasi dari sisi pengeluaran dan redistribusi ketimpangan pendapatan bersifat negatif dari sisi pendapatan.

Pertumbuhan PDRB yang tidak seimbang pada wilayah studi penelitian ini menggambarkan bahwa adanya potensi yang berbeda pada setiap daerah. Untuk itu pemerintah pusat dengan kebijakan sentralistik mengatur pola dana bagi hasil melalui TKDD bertujuan

mengatasi kesenjangan antar wilayah dan menciptakan keseimbangan adil dan merata. Seperti pemberian dana bagi hasil pertambangan dan penggalian juga dibagikan pada daerah wilayah sekitar, selain daerah penghasil untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. TKDD berupa dana insentif daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana desa. Nilai transfer ini menunjukkan pertumbuhan per tahunnya, seiring dengan kebutuhan dan kreatif dari pemerintahan daerah dalam menggali potensi sumber daya yang ada dan memaksimalkannya untuk mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil dari analisa dari penelitian yang pernah dilakukan oleh (Kuznetsova et al., 2023).

Hubungan antara Kekuatan Pajak Daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL yang ditunjukkan pada Tabel 8, mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan baik pada periode jangka panjang maupun jangka pendek antara kekuatan pajak daerah dengan indeks kapasitas fiskal daerah, yang berarti bahwa kekuatan pajak daerah dari hasil pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Provinsi maupun hasil pengelolaan sumber objek pajak oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Hidayat & Yulianita, 2025). Pajak daerah merupakan sektor yang diandalkan pada penerimaan daerah karena adanya program penguatan basis pajak daerah berdasarkan domisili wajib pajak daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi alasan basis data pajak yang kuat. Dengan menerapkan opsen pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta diversifikasi pajak daerah dapat memberikan kekuatan basis pajak. Bahwa perekonomian yang semakin membaik dan keterbukaan perdagangan memberikan perubahan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pentingnya fokus pada upaya liberalisasi keterbukaan perdagangan dan perekonomian yang membaik dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, sekaligus mengendalikan inflasi. Hasil kajian ini pernah dilakukan oleh (El Yamani, 2024).

Penerimaan pajak daerah memberikan porsi terbesar dalam komponen PAD, sekitar 70-80 persen dari penerimaan PAD, hal ini disebabkan banyaknya basis data pajak di daerah dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Desentralisasi fiskal yang diharapkan memberikan kemampuan dalam penguatan sektor pajak daerah dengan basis pajak yang kuat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada perusahaan swasta di daerah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan regional secara permanen pada tidak ada biaya pertumbuhan secara agregat, seperti halnya penerapan keseragaman dalam peraturan transfer pusat yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam mengelola penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah, agar daerah bisa lebih berdikari untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan dari hasil penelitian oleh (Nizam et al., 2024).

Dalam struktur perekonomian daerah, pajak daerah mempunyai peran sebagai sumber pendapatan daerah maupun sebagai stimulus perekonomian daerah dengan memberikan

program insentif fiskal bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produktivitasnya. Dari sisi pendapatan sektor pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian jika dilihat dari PDRB pada level daerah menunjukkan bahwa tingkat kekuatan daerah dalam mendorong nilai manfaat produk dalam periode waktu yang telah ditentukan. PDRB merupakan nilai tambah kotor barang serta jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik daerah yang timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor dari hasil produksi dapat dipengaruhi oleh nilai residen atau non-residen. Hasil ini mengkonfirmasi adanya perbedaan hasil dari penelitian (Štilić et al., 2023).

Pajak daerah merupakan sektor yang diandalkan pada penerimaan daerah karena adanya program penguatan basis pajak daerah berdasarkan domisili wajib pajak daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi alasan basis data pajak yang kuat. Dengan menerapkan opsen pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta diversifikasi pajak daerah dapat memberikan kekuatan basis pajak. Bahwa perekonomian yang semakin membaik dan keterbukaan perdagangan memberikan perubahan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pentingnya fokus pada upaya liberalisasi keterbukaan perdagangan dan perekonomian yang membaik dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil ini mengindikasikan adanya kesamaan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Ibrahimov et al., 2023).

Hubungan antara Kontribusi PAD terhadap Pendapatan dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL yang ditunjukkan pada Tabel 8, mengindikasikan bahwa secara jangka panjang dan jangka pendek dari model terdapat hubungan positif yang signifikan antara nilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dengan indeks kapasitas fiskal daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan membuka ruang bagi kapasitas fiskal daerah yang semakin baik dengan berbagai strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam menggali potensi daerah. Hasil kajian ini mengkonfirmasi adanya kesamaan dari hasil penelitian (Robert Montances & Angelo Verano, 2023).

Pemerintah pusat mempunyai peran menjaga keseimbangan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan dana TKDD oleh pemerintah pusat untuk memberikan stimulus tertentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan pendapatan dan belanja yang masih rendah, memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pola TKDD. Dengan kondisi pembangunan yang semakin merata antar daerah dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan per kapita dan penangguran berkurang, hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kesamaan hasil dari penelitian (Karangwa & Su, 2023).

Kemandirian fiskal daerah dari sisi penerimaan daerah merupakan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan daerah dengan mengurangi

ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Potensi pendapatan daerah yang dapat digali berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan berupa pendapatan sektor retribusi daerah, pajak daerah, lainnya PAD yang sah serta harta kekayaan daerah yang dipisahkan. Diversifikasi pendapatan daerah dapat menjadi alternative solusi yang baik untuk pengentasan kemiskinan multidimensi pada level rumah tangga. Hasil kajian ini mengkonfirmasi adanya kesamaan hasil penelitian (Tvaronaviciene et al., 2023).

Hubungan antara Realisasi PAD dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL yang ditunjukkan pada Tabel 8, mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat hubungan positif signifikan antara realisasi PAD terhadap indeks kapasitas fiskal daerah, baik pada model jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin tinggi nilai realisasi PAD dari suatu daerah, maka akan semakin leluasa dalam penggunaan belanja pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Hasil kajian ini mengindikasikan adanya kesamaan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Volume & Issue, 2023).

Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan penyerahan kewenangan desentralisasi fiskal ke daerah dari sisi pendapatan yang berasal dari potensi dan karakteristik asli daerah, PAD mengalami pertumbuhan positif seiring dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah dimaksudkan karena pemerintah daerah lebih dekat dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Sektor yang berkontribusi terbesar pada PAD berasal dari penerimaan sektor perpajakan daerah, antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan kewenangan dalam penarikan pajak daerah, pemerintah daerah harus mampu merespon sektor mana yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang harus didukung dengan insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak untuk daya tarik meningkatkan perekonomian daerah. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa adanya kesamaan hasil dari penelitian (Djamal et al., 2023).

Implementasi otonomi daerah membuka peluang kepada pemerintahan daerah dalam kewenangan desentralisasi fiskal. Kewenangan yang telah diberikan dalam bentuk pengaturan belanja yang lebih fokus dan mencari sumber pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dikelola sesuai kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat berupa PAD yang terdiri dari komponen retribusi daerah, pajak daerah, lainnya PAD yang sah serta pengelolaan harta kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintahan di negara-negara berkembang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dengan memperkuat basis pajak, pinjaman daerah serta mengumpulkan pajak dari biaya. Hasil ini pernah diteliti oleh (Asrari & Wau, 2023).

Hubungan antara Kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL yang ditunjukkan pada Tabel 8, mengindikasikan bahwa secara statistik baik dalam periode jangka panjang maupun jangka pendek adanya hubungan positif signifikan antara kontribusi PAD terhadap PDRB Non Migas dengan indeks kapasitas fiskal daerah. Walaupun otonomi daerah dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori alokasi nilai transfer dana ke daerah. Mandatori nilai transfer dana ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB juga meningkat. Hasil ini mengkonfirmasi adanya kesamaan hasil penelitian oleh (Saucedo-Acosta, 2024). Bentuk dana transfer ke daerah antara lain dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana insentif fiskal daerah serta bagi hasil pajak. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah provinsi yang terstruktur pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisa ini mengkonfirmasi adanya kesamaan hasil dari penelitian (Lee, 2024).

Hubungan antara Kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil estimasi model ARDL yang ditunjukkan pada Tabel 8, mengindikasikan bahwa secara statistik, baik model jangka panjang maupun model jangka pendek terdapat hubungan yang positif signifikan antara kontribusi PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah dengan indeks kapasitas fiskal daerah. Dampak positif dari kontribusi PAD terhadap struktur perekonomian makro PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah, dimana setiap penerimaan pendapatan asli daerah yang akan menjadi belanja pada pengeluaran konsumsi pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik di masyarakat dalam bentuk konsumsi nilai barang dan jasa, maka akan semakin meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil ini memiliki kesamaan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Bah, 2023) dan penelitian oleh (Korotun et al., 2020).

Dengan kebutuhan pembiayaan daerah dalam pembangunan yang terus meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah daerah,

pemerintahan daerah juga perlu mencari alternatif pendanaan lainnya selain dari dana transfer ke daerah. Untuk itu pemerintahan daerah dapat melakukan pola kemitraan dengan membuka peluang investasi daerah untuk tumbuh dan memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah. Hasil analisa ini mengindikasikan adanya kesamaan hasil penelitian oleh (Ayala et al., 2021). Investasi daerah dapat memberikan keuntungan bagi pemerintahan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan percepatan pelayanan publik disaat kondisi PAD yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus menempuh kebijakan dengan memberikan insentif fiskal baru untuk menarik investor atau jenis penanaman modal asing lainnya yang dapat menguntungkan serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil kajian ini memiliki kesamaan dari hasil analisa dari penelitian oleh (Semmerling et al., 2022).

Peningkatan belanja modal pembangunan dalam bentuk belanja infrastruktur dan konektivitas akan memperlancar arus distribusi logistik barang, mempercepat waktu tempuh serta efisien biaya transportasi. Pada akhirnya, peningkatan belanja daerah mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. KESIMPULAN

Hasil analisa dari model ARDL dan VECM yang terbentuk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah dalam persamaan model dipengaruhi oleh variabel atau meta indikator intermediate outcomes pada cascading pohon kinerja. Meta indikator yang diuji sebagai variabel yang mendukung kinerja indeks kapasitas fiskal daerah pada persamaan model ini sebagai critical success factor dari kinerja indeks kapasitas fiskal daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan dan menggali potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud nyata kemandirian fiskal daerah. Melalui penguatan basis data pajak daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah atau intensifikasi pajak daerah tetap terus dijaga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan melalui opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagai upaya memperkuat local taxing power daerah untuk berkontribusi terhadap PDRB wilayah.

Pemberian insentif fiskal daerah juga diupayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberikan stimulus perekonomian daerah untuk perkembangan investasi daerah. Dengan peningkatkan investasi daerah akan menciptakan peluang ekstensifikasi pajak daerah terus berkembang. Perluasan ekstensifikasi pajak daerah terutama pada sektor industri yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor dan penggunaan air permukaan akan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan daerah.

7. REFERENSI

- Ackom, E. K. (2025). *Revenue Mobilization as an Impetus for Economic Growth in Sub- Saharan Africa : The Influence of Tax Compliance and Informal Sector*. 13(05), 73–94.
- Adan, M. A., Muriithi, D. K., Mbaabu, O., Adan, M. A., Muriithi, D. K., & Mbaabu, O. (2023). *Effect of Human Capital Investment on Income Inequality in Kenya*. 288, 30. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.4.288>
- Afonso, A., & Blanco-Arana, M. C. (2024). Does financial inclusion enhance per capita income in the least developed countries? *International Economics*, 177(December 2023). <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100479>
- Agyei-ababio, N., & Ansong, E. (2023). *Digitalization of revenue mobilization in an emerging economy: the new Institutional Theory perspective*. 11(2), 5–22. <https://doi.org/10.12821/ijispm110201>
- Asrari, M. Z., & Wau, T. (2023). *Macroeconomics, sharia, and economic inequality in The Organization of Islamic Cooperation (OIC): An empirical study Makroekonomi, syariah, dan ketimpangan ekonomi di Organization of Islamic Cooperation (OIC): Sebuah kajian empiris Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International License (CC-BY-NC-SA)*. 10(3), 203–219. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp203-219>
- Ayala, L., Herrero, A., & Martinez-Vazquez, J. (2021). Welfare benefits in highly decentralized fiscal systems: Evidence on interregional mimicking. *Papers in Regional Science*, 100(5), 1178–1208. <https://doi.org/10.1111/pirs.12605>
- Bah, I. A. (2023). The relationship between education and economic growth: A cross-country analysis. *Research, Society and Development*, 12(5), e19312540522. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i5.40522>
- Boogaard, V. V. A. N. D. E. N., Prichard, W., Benson, M. S., & Milicic, N. (2018). *TAX REVENUE MOBILIZATION IN CONFLICT-AFFECTED DEVELOPING COUNTRIES*. 364, 345–364. <https://doi.org/10.1002/jid.3352>
- Bushashe, M. A., & Bayiley, Y. T. (2024). Fiscal federalism and economic development in Ethiopia: a moderating effect analysis of macroeconomics instability. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2333085>
- Chen, W. Y., & Hsu, L. Y. (2024). Is income catch-up related to happiness catch-up? Evidence from eight European countries. *Heliyon*, 10(5), e26544. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26544>
- Cota, B., Erjavec, N., & Jakšić, S. (2023). Economic complexity and income inequality in EU countries. *Croatian Operational Research Review*, 14(1), 77–86. <https://doi.org/10.17535/corr.2023.0007>
- Danquah, J., Kumi, M., Agyekum, B., & Nketiah-, E. (2024). *Social Sciences & Humanities Open The influence of education on addressing the challenges of taxation and cocoa revenue mobilization in Ghana*. 10(June).
- De Wettinck, Q., & van Mourik, A. (2024). The Impact of Economic Integration on Income Inequality in the EU: A Panel Data Analysis of the EU Members from 2002-2020. *Journal of Economic Integration*, 39(1), 1–41. <https://doi.org/10.11130/jei.2024006>
- Dempere, J., Qamar, M., Allam, H., & Malik, S. (2023). The Impact of Innovation on Economic Growth, Foreign Direct Investment, and Self-Employment: A Global Perspective. *Economies*, 11(7), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies11070182>
- Djamal, D., Fairou, C., & Oulad Brahim, L. (2023). Effect of Human Capital on Economic Growth in South Africa: an ARDL Approach. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 7(4), 1–13.

[https://doi.org/10.61093/fmir.7\(4\).1-13.2023](https://doi.org/10.61093/fmir.7(4).1-13.2023)

- Economics, A., Xxxii, V., Faculty, S., Faculty, A. Y., & Faculty, A. H. (2025). *The effect of fiscal decentralization and monetary policy on economic resilience in Indonesia : a panel data. XXXII*(3), 101–122.
- El Yamani, R. (2024). A study on the effectiveness of financial development on economic growth of Morocco. *Revistamultidisciplinar.Com*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.23882/rmd.24201>
- Giorkhelidze, D. (2024). Modern Analyses of Macroeconomic Indices for Medium and Long Term Plans in Georgia. *European Scientific Journal, ESJ*, 20(37), 26. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n37p26>
- Hang, M., & Pham, P. (2025). *FISCAL DECENTRALIZATION : THE CASE OF VIETNAM. 5*, 106–130. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2025-0-5-106-130>
- Hern, P. (2024). *Governance and Fiscal Decentralisation in Latin America : An Empirical Approach*.
- Hidayat, A., & Yulianita, A. (2025). *Fiscal decentralization , monetary policy , and economic growth in Indonesia : A panel data analysis. 13*(4), 375–397. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i4.42111>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization , economic growth , and human development : Empirical evidence Fiscal decentralization , economic growth , and human development : Empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Ibrahimov, Z., Hajiyeva, S., Seyfullayev, I., Mehdiyev, U., & Aliyeva, Z. (2023). The impact of infrastructure investments on the country's economic growth. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 415–425. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.39](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.39)
- Javeed Iqbal, Shazia Khalid, & Muhammad Tariq. (2024). The Impact of Tax Collection and Domestic Entrepreneurial Business Ventures on Services Sector in Pakistan: An ARDL Bound Test Approach. *Journal of Entrepreneurship and Business Venturing*, 4(1). <https://doi.org/10.56536/jebv.v4i1.84>
- Johnson, P. N., & Omodero, C. O. (2021). *GOVERNANCE QUALITY AND TAX REVENUE MOBILIZATION IN. 28*(42), 1–41. <https://doi.org/10.2478/jles-2021-0009>
- Karangwa, A., & Su, Z. (2023). Towards a Multidimensional Model for Evaluating the Sustainable Effect of FDI on the Development of Host Developing Countries: Evidence from Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/su15054662>
- Khan, Z., & Khan, M. A. (2023). The Effect of Monetary Policy on Income Inequality: Empirical Evidence from Asian and African Developing Economies. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(3), 133–158. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0028>
- Korotun, V., Kaneva, T., Drepin, A., Levaieva, L., & Kucherenko, S. (2020). The impact of fiscal decentralization on economic growth in central and eastern Europe. *European Journal of Sustainable Development*, 9(3), 215–227. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p215>
- Kuznetsova, N., Tkachuk, V., Obikhod, S., Vlasenko, T., Samborska, O., & Chorna, L. (2023). Development and Preservation of Human Capital Under the Conditions of the Creative Economy. *Financial Engineering*, 1, 80–87. <https://doi.org/10.37394/232032.2023.1.7>
- Lakhan, A. B., Ali, M., & Talreja, K. (2023). An Analysis of Economic Development and Human Development Index as Economic and Social behavior: A Case Study of Pakistan. *Research Journal for Societal Issues*, 5(2), 318–329. <https://doi.org/10.56976/rjsi.v5i2.117>
- Lee, K. K. (2024). Korea's economic growth and the growth model in the changing global economy. *Japanese Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/2329194X.2024.2325981>
- Levin, A., Lin, C.-F., & James Chu, C.-S. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. In *Journal of Econometrics* (Vol. 108). www.elsevier.com/locate/econbase
- Liu, C., Tu, J., & He, Y. (2023). Measurement of China's Human Development Index and Analysis of

- Its Influencing Factors from the Perspective of New Development Concept. *Social Indicators Research*, 167(1–3), 213–268. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03105-w>
- Minhaj, N., & Ahmed, R. (2023). Impact of Human Capital Development and Economic Growth on Global Competitiveness. *Global Economics Science*, 1–18. <https://doi.org/10.37256/ges.5120241632>
- Mpofu, F. Y. (2022). *Industry 4 . 0 in Financial Services: Mobile Money Taxes , Revenue Mobilisation , Financial Inclusion , and the Realisation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Africa*.
- Nizam, N. S. K., Safian, S. S., Jamaludin, S., & Osman, A. A. (2024). The Effect of Inflation and Interest Rate on Consumer Spending: Empirical Evidence from Malaysia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(2.2), 1–26. <https://doi.org/10.14738/assrj.112.2.16399>
- Olaide, K., Simo-kengne, B. D., & Uwilingiye, J. (2022). *Sustainable Development – Fiscal Federalism Nexus : A “ Beyond GDP ” Approach*.
- Olaide, K., Uwilingiye, J., & Simo-kengne, B. D. (2025). *The relationship between fi scal federalism and fi scal discipline: panel quantile regression approach*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04489-5>
- Papers, S. (1994). *Bahmani-Oskooee-Brooks1999_Article_BilateralJ-CurveBetweenUSAndHe*.
- Ren, H., Xian, Z., Zhu, B., & Lin, H. (2025). Fiscal decentralization and regional Innovation : Dual mechanisms of human capital mediation and financial development moderation. *International Review of Economics and Finance*, 102(May), 104370. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104370>
- Robert Montances, J. G., & Angelo Verano, A. (2023). *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies Impact of Selected Macroeconomic Variables in Economic Growth: Empirical Study in the Philippines*. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Saha, J. C. (2023). Increasing returns to GNI per capita and the human development index (HDI). *Les Cahiers Du Cread*, 39(1), 87–121. <https://doi.org/10.4314/cread.v39i1.4>
- Saucedo-Acosta, E. J. (2024). INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH AT THE EUROPEAN UNION. *DIEM Dubrovnik International Economic Meeting*, 9(1), 73–80. <https://doi.org/10.17818/DIEM/2024/1.5>
- Semmerling, A., Paczoski, A., & Cirella, G. T. (2022). Decentralization and tax independence in OECD countries: GDP per capita analysis from 1995–2018. *Journal of Banking and Financial Economics*, 2022(1(17)), 42–59. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2022.1.3>
- Shah, F. N., Awan, M. S., & Tasleem, R. H. (2023). New Evidence on the Effect of Human Capital on Economic Growth of Pakistan. *Journal of Education and Social Studies*, 4(1), 166–175. <https://doi.org/10.52223/jess.20234116>
- Sheikh, A. Y., & Nur, M. (2025). *Asian Journal of Economic Modelling Fiscal dynamics in fragile economies : A VAR analysis of revenue mobilization and government spending in Somalia* Keyword s. 13(2), 278–295. <https://doi.org/10.55493/5009.v13i2.5450>
- Shi, H., Xiao, J., Su, R., & Goulias, K. G. (2024). Measurement of happiness of daily activity-travel schedules. *Travel Behaviour and Society*, 36(April), 100807. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2024.100807>
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Štilić, A., Mastilo, A., Vuković, K., & Mastilo, D. (2023). Innovative Solutions for Economic Growth: Exploring the Impact of Economic Freedoms on Foreign Direct Investment Attraction. *ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal*, 11(1), 29–44. <https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0013>
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap : Dynamics of Indonesia ’ s public

- expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85(March), 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Tolossa, G., & Melese, W. E. (2024). Revisiting determinants of tax revenue mobilization in Sub-Saharan African countries: does e-government matter? *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2399937>
- Tvaronaviciene, M., Simelyte, A., & Stirblyte, G. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment from the Nordic Countries on the Structure of Lithuania's Economy. *Marketing and Management of Innovations*, 14(4), 112–127. <https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-08>
- Udoumoh, E. F., Subeno, T., & William, U. I. (2023). Assessment of the Impact of Some Socio - Economic Variables on Worldwide Average Life Expectancy: A Logit Approach. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 21(1), 29–36. <https://doi.org/10.9734/ajpas/2023/v21i1454>
- Volume, J., & Issue, X. (2023). *Monetary Policy and People's Socio-Economic Welfare in Nigeria*. <https://doi.org/10.51244/IJRSI>
- Yin, P., Abdulai, A., & Asamoah, K. (2024). Social Sciences & Humanities Open Local revenue mobilisation in Ghana: Why similar metropolitan and municipal assemblies exhibit different outcomes. *Social Sciences & Humanities Open*, 9(February), 100853. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100853>
- Zongo, N., & Faso, B. (2022). *ournal of*. 37(2), 316–336.